

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah fenomena yang menarik dalam politik kontemporer Indonesia. Selain menawarkan pendekatan baru dan berbeda dalam politik Islam, partai ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam perolehan suara dalam Pemilu dan keanggotaannya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi berdiri pada tanggal 20 April 2002 –yang sebelumnya lahir pada tanggal 9 Agustus 1998 sebagai Partai Keadilan-. Sedangkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta, diresmikan pada tanggal 14 Juni 2003. Partai ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang pada Pemilu 2004 tidak cukup syarat untuk melaju menjadi peserta Pemilu, karena terganjal oleh adanya peraturan pencapaian suara pada Pemilu 1999 harus minimal 2% (*electoral threshold*). Hampir tidak ada perbedaan antara Partai Keadilan (PK) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan dari luar tampak bahwa semua anggota PK kemudian beralih menjadi anggota PKS.

Kehadiran partai ini cukup fenomenal. Partai Keadilan (PK) pada awal berdirinya yaitu tahun 1998, mendapat dukungan yang cukup luas dari kalangan profesional dan mahasiswa. Pendukung partai ini pada umumnya berasal dari kampus-kampus, baik negeri maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri. Bahkan di luar negeri, partai ini menduduki peringkat pertama

pada Pemilu 1999 untuk suara terbanyak. Dengan demikian, mayoritas anggota PK merupakan kaum muda terpelajar, yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi.

Pengakuan bahwa PKS adalah partai masa depan tidak hanya disampaikan oleh tokoh-tokoh internal Parpol, tetapi juga dari pengamat politik, pejabat, dan profesional di luar PKS, bahkan kalangan nasrani menyatakan apresiasi yang sama (Djony Erdward, 2006: xxiii). Namun, sebagai parpol baru dan ibarat bayi yang masih merangkak, pada pemilu 1999, PK tidak lolos dalam ketentuan *electoral treshold* 2%. Ketika itu, PK hanya mampu meraih suara 1,4%. Namun PK tetap bisa mengutus wakilnya di DPR dan DPRD bersinergi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Fraksi Reformasi.

Meskipun telah tumbuh pesat sebagai parpol, PKS tampak tetap konsentrasi mengelola kader dan anggotanya. Sebagai partai dakwah berbasis kader, PKS memiliki sistem yang terstruktur untuk melakukan penjagaan-penjagaan terhadap kader-kader dan anggotanya. Aspek-aspek pengembangan *kafaah* (wawasan) dan pemahaman kader, menjadi titik tekan yang sangat jelas diterapkan oleh PKS. Ada sebuah fenomena unik yang sangat menarik untuk diteliti, terkait keberimbangan PKS dalam pengelolaan kader dan juga partisipasinya dalam perpolitikan. Adanya prinsip yang sangat nyata yang dipakai oleh PKS, yaitu selalu mendasarkan kepahaman kader dan anggotanya kepada Islam dari sumber-sumber orisinal, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kemampuan Partai Keadilan Sejahtera untuk melahirkan massa dan pendukung yang solid tentunya tidak lepas dari adanya faktor-faktor rekrutmen (kaderisasi) dan juga pola komunikasi yang diterapkan para anggotanya. Sebagai partai kader berbasis massa, Partai Keadilan Sejahtera memiliki perhatian yang cukup besar terhadap para anggotanya. Salah satunya adalah perhatian terhadap pola komunikasi internal anggota yang dianggap sebagai salah satu kunci penjagaan soliditas internal partai.

Komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial. Apabila orang telah mengadakan hubungan tetap, maka sistem komunikasi yang mereka lakukan akan menentukan apakah sistem tersebut dapat mempererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan atau melenyapkan persengketaan apabila muncul.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang *nota bene* sebagai partai kader, memiliki pola komunikasi yang menarik untuk diteliti. Meskipun telah banyak beredar bahwa PKS adalah partai yang bersih, ternyata diungkapkan oleh beberapa kadernya, partai inipun pernah mengalami konflik internal. Hanya saja, kadar konflik internal yang terjadi bisa segera diselesaikan dengan pola komunikasi yang dibangun di internal PKS.

PKS tidak pernah terlihat ada konflik internal berkaitan dengan agenda-agenda kepartaian, suksesi kepartaian, ataupun suksesi pemerintahan. Semisal konflik internal menjelang Pilkada ataupun perebutan kekuasaan antar anggota PKS. Latar belakang konflik biasanya hanya karena perbedaan

pendapat internal anggota, yang akhirnya sering diselesaikan dengan komunikasi yang efektif dan pola komunikasi yang telah dijalankan.

Tidak sebagaimana yang terjadi di partai-partai politik lain yang mengalami konflik internal, semisal yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga sempat diprediksi akan sangat kecil kemungkinan adanya perdamaian antara Ketua Umum Dewan Syura PKB -Abdurrahman Wahid- dan Ketua Umum Dewan Tanfidz -Muhaimin Iskandar-. Meskipun pernah mengalami konflik internal, selama ini PKS terlihat lebih mengedepankan penyelesaian untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dilihat dari adanya banyak sekali pola komunikasi yang dibangun di internal anggota dan kader PKS.

Beberapa kader PKS juga menyatakan belum merasa nyaman dengan pola komunikasi yang dibangun oleh PKS, meskipun secara personal mereka merasa sangat nyaman berada di dalam keanggotaan PKS. Partai yang memiliki jargon Bersih, Peduli dan Profesional ini, ternyata -diungkapkan juga oleh kadernya-, memiliki pola komunikasi yang berbeda dengan partai-partai lain. Selain itu PKS juga memiliki pola komunikasi yang berbeda antara kader/anggota putra dan kader/anggota putri. Namun pola komunikasi dalam hal-hal apa saja yang menjadi perbedaan antara kader putra dan putri, itulah yang perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan interaksi internal kader yang terlihat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki beberapa pola komunikasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kader PKS, bahwa PKS memiliki sistem *bayanat*

(penjelasan), *qoror* (perintah), *taklimat* (pengumuman). Pola komunikasi yang dibangun sebagaimana di atas, dijalankan oleh kader PKS dari yang memiliki jabatan atau posisi pemimpin (*qiyadah*) kepada bawahan (*jundiyah*). Selain itu, PKS juga memiliki sistem *syuro* (rapat) sebagai pola komunikasi dalam pengambilan keputusan. Efektifitas pola komunikasi yang dibangun oleh PKS ternyata di lapangan pun ditanggapi berbeda-beda oleh para kadernya. Ada yang beranggapan bahwa pola komunikasi yang dibangun selama ini sudah cukup efektif. Namun beberapa kader masih merasa belum merasakan adanya keefektifan dalam pola komunikasi internal kader PKS.

Adanya pola komunikasi yang berbeda dengan partai politik yang lain, menjadi keunikan tersendiri bagi PKS. PKS pun terlihat sangat memperhatikan batas-batas interaksi antara kader putra dan putri dalam berkomunikasi personal. Budaya lain yang tampak terlihat di PKS adalah adanya budaya *tabayyun* (klarifikasi) dan *husnudzon* (berprasangka baik) di internal kader dan eksternal.

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya mengedepankan adanya sikap taat terhadap pesan yang disampaikan oleh pemimpin (*qiyadah*) kepada bawahan (*jundiyah*). Contohnya adalah ketika ada keputusan MK terkait penetapan Calon Legislatif PKS menjadi Anggota Legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak dan bukan berdasarkan nomor urut, hal itupun bisa diterima dengan baik oleh semua kader PKS bahkan simpatisan. Tidak ada konflik yang kemudian menampakkan adanya perebutan kesempatan

untuk mendapatkan suara terbanyak. Hal tersebut bisa menjadi salah satu parameter berjalannya sebuah pola komunikasi di internal anggota PKS.

Kiranya pola komunikasi seperti apa yang dikembangkan oleh internal kader Partai Keadilan Sejahtera, khususnya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta, akan ditinjau lebih lanjut dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimanakah pola komunikasi internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan tambahan wawasan mengenai pola komunikasi internal kader partai politik, dalam hal ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

2. Manfaat praktis

Hasil studi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan atau tambahan referensi bagi partai politik yang bersangkutan (Partai Keadilan Sejahtera), dalam memformulasikan kebijakan mengenai pola komunikasi internal kader.

E. Telaah Pustaka

1. Pola Komunikasi

Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Frase *dua orang atau lebih* perlu ditekankan, karena sebagian literatur menyebut istilah *komunikasi intrapersonal*, yakni komunikasi dengan diri sendiri.

Komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial. Apabila orang telah mengadakan hubungan tetap, maka sistem komunikasi yang mereka lakukan akan menentukan apakah sistem tersebut dapat mempererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan ataupun melenyapkan persengketaan apabila muncul.

Istilah “komunikasi” berasal dari perkataan Inggris “*communication*” yang bersumber dari kata latin “*communicatio*” yang berarti “pemberitahuan” atau pertukaran pikiran. Makna hakiki dari “*communication*” ini ialah “*communis*” yang berarti “sama”, jelasnya “kesamaan arti”.

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok (Widjaja, 1993:1). Baik secara sadar atau tidak, sejak lahir manusia sudah sering melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tangisan seorang bayi misalnya, merupakan suatu tanda komunikasi. Suatu kegiatan atau aktivitas bisa berjalan dengan baik jika ada komunikasi antar manusia. Unsur-unsur yang diperlukan dalam berkomunikasi antara lain sumber (pembicaraan), pesan (*message*), saluran (*channel*, media) dan penerima (*receiver*, *audience*). Dalam proses komunikasi diusahakan melalui penyampaian dan tukar menukar pendapat dan informasi, ataupun adanya perubahan sikap.

Komunikasi merupakan proses alih informasi dan memperoleh informasi yang penting untuk mempraktekkan tanpa memerlukan eksistensi orang. Dari sudut pandang yang mendasar tanpa berkomunikasi akan menyebabkan pengabaian keberadaan manusia, dari segala aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan banyak masalah atau membentuk proses pengiriman serta penerimaan informasi. Alasan mendasar untuk berbagai macam komunikasi, apakah dalam bentuk syarat-syarat yang mengirimkan *impuls* (dorongan) sebagai bentuk respon terhadap individu akan menimbulkan aksi timbal balik untuk membalas salah satunya melalui komunikasi. (Hunneryager, 1992:15)

Jadi antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi harus ada kesamaan arti. Rumitnya jaringan dan ruwetnya jalur-jalur komunikasi menyebabkan seringkali timbul 'salah komunikasi' (*miscommunication*)

dan juga ‘salah interpretasi’ (*misinterpretation*). Karena itu, perlu mempunyai pegangan apa yang menjadi dasar dari suatu proses komunikasi.

Dari tinjauan terhadap komunikasi secara epistemologi tadi. Dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Komunikasi harus meliputi paling sedikit tiga komponen. Komponen pertama adalah komunikator, yakni orang yang menyampaikan isi komunikasi tersebut. Komponen kedua adalah komunikan, orang yang menerima isi komunikasi tersebut. Komponen ketiga adalah isi komunikasi sendiri yang biasa disebut ‘pesan’ sebagai terjemahan dari ‘*message*’. Kalau ada salah satu dari tiga komponen itu tidak ada, maka komunikasipun tidak ada. Orang yang menggerutu sendiri atau berteriak minta tolong bukan komunikasi, hanya pelampiasan isi hatinya saja, sebab disitu tidak ada komponen yang jelas menjadi sasaran kepada siapa pesannya itu disampaikan.
2. Pesan komunikasi harus sama-sama dimengerti oleh komunikator dan komunikan. Kalau seorang tidak mengerti perihal yang dikatakan orang lain kepadanya, komunikasi tidak terjadi. Dalam hubungan ini ada dua hal yang harus dimengerti oleh komunikan. Pertama adalah bahasa yang digunakan, dan kedua adalah isi maksud yang dimaksud – yang dikomunikasikan dengan bahasa tersebut-. Mungkin saja bahasanya dimengerti, tetapi belum tentu isi maksudnya. (Onong Uchjana, 1992:44)

1.1 Model Komunikasi

Untuk lebih memahami fenomena komunikasi, kita akan menggunakan model-model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Model jelas bukan fenomena itu sendiri, meskipun di beberapa kondisi, model sering dicampuradukkan dengan fenomena komunikasi (Deddy Mulyana, 2007:131).

Menurut Sereno dan Mortensen, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak penting dalam dunia nyata. Sedangkan B. Aubrey Fisher mengatakan, model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan. Atau, seperti dikatakan Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr., model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena hubungan antar model dengan teori begitu erat, model sering dicampuradukkan dengan teori. (Deddy Mulyana, 2007: 132).

Sejauh ini terdapat ratusan model komunikasi yang telah dibuat oleh para pakar. Kekhasan suatu model komunikasi juga dipengaruhi oleh

latar belakang keilmuan (pembuat) model tersebut, paradigma yang digunakan, kondisi teknologis, dan semangat zaman yang melingkunginya.

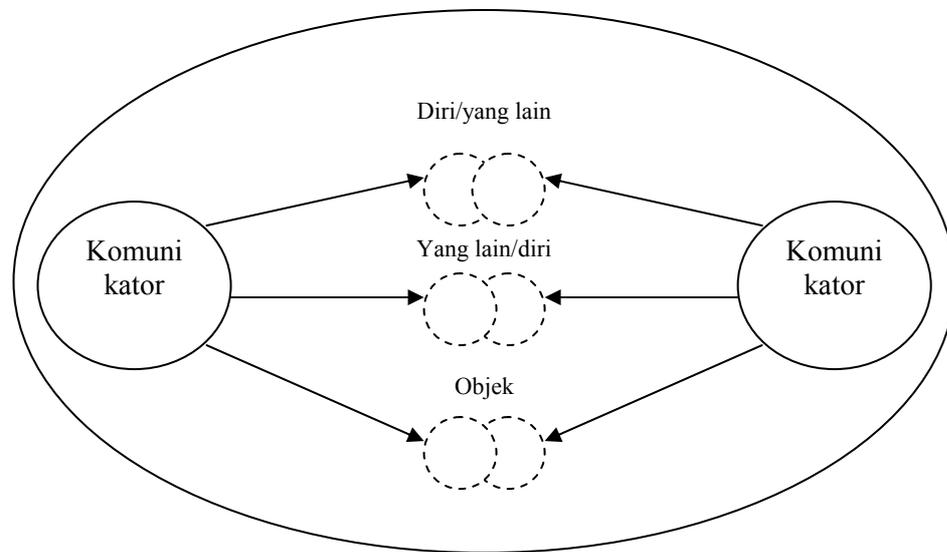
Dalam hal ini, pola komunikasi yang terjadi di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih cenderung pada sebuah model komunikasi, yaitu **model interaksional**.

Model interaksional merujuk pada sebuah model komunikasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan sosial yang menggunakan perspektif interaksi simbolik, dengan tokoh utamanya George Herbert Mead yang salah seorang muridnya, Herbert Blummer. Model interaksional sebenarnya sangat sulit untuk digambarkan dalam model diagramatik, karena karakternya yang kualitatif, nonsistemik, dan nonlinier. Menurut model ini, orang-orang sebagai peserta komunikasi bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. Paham ini menolak bahwa individu adalah organisme pasif (seperti dalam model stimulus-respons atau model-model komunikasi lain yang berorientasi efek), yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur di luar dirinya. Dalam konteks ini, Blummer mengemukakan tiga premis yang menjadi dasar model ini. *Pertama*, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya (simbol verbal, simbol nonverbal, lingkungan fisik). *Kedua*, makna diciptakan, dipertahankan, dan diubah lewat proses penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena individu terus berubah, masyarakat pun

berubah melalui interaksi. Jadi interaksi-lah yang dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat. Struktur itu sendiri tercipta dan berubah karena interaksi manusia (Deddy Mulyana, 2007:173).

Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain (*role-taking*). Diri (*self*) berkembang lewat interaksi dengan orang lain, dimulai dengan lingkungan terdekatnya seperti keluarga (*significant others*) dalam suatu tahap yang disebut tahap permainan (*play stage*) dan terus berlanjut hingga ke lingkungan luas (*generalized others*) dalam suatu tahap yang disebut tahap pertandingan (*game stage*). Dalam interaksi itu, individu selalu melihat dirinya melalui perspektif (peran) orang lain. Maka konsep diri pun tumbuh berdasarkan bagaimana orang lain memandang diri individu tersebut.

Fisher menggambarkan suatu model diagramatik seperti tampak pada diagram di bawah.



Sumber: B. Aubrey Fisher. *Teori-teori Komunikasi*. Penerj. Soejono Trimo. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, hlm. 242

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam hal ini memiliki pola komunikasi dimana antara satu individu yang satu dengan individu yang lain saling berkaitan secara aktif. Anggota/kader PKS memiliki pola timbal balik (*feedback*) dalam berinteraksi, sehingga mereka mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi. Dan berdasarkan model komunikasi ini, PKS mengacu pada pola hubungan dua arah. Dalam beberapa pola komunikasi internal, misalnya rapat, PKS memiliki sistem timbal balik antar anggota. Keputusan diambil berdasarkan interaksi yang dilakukan. Berdasarkan pembahasan internal yang akhirnya membawa pada sebuah kebijakan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa PKS mengedepankan keaktifan peran personal. Dalam pola komunikasi yang lain, misalnya *tabayyun* (klarifikasi), PKS

juga memiliki alur yang melibatkan dua belah pihak. Tidak terlihat adanya perlakuan sepihak ketika ada kader atau anggota yang melakukan kesalahan, sebelum ada *tabayyun* (klarifikasi). Begitupun dalam pola komunikasi lain, semisal *bayanat* (penjelasan), *taklimat* (pengumuman), ataupun *qoror* (perintah). Semuanya mengedepankan peran penting keaktifan personal secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam penerapan model komunikasi interaksional, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dalam tinjauan psikologis sangat penting bagi kebahagiaan hidup manusia. Jhonson menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia.

Pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial manusia. *Kedua*, identitas atau jati diri manusia terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. *Ketiga*, dalam rangka memahami realitas di sekeliling serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang dimiliki individu tentang dunia sekitar, perlu untuk diperbandingkan dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama. *Keempat*, kesehatan mental manusia sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan dengan orang lain, lebih-lebih orang yang merupakan tokoh signifikan (*significant figurs*) dalam hidup manusia (Supratiknya, 1995:53)

Adapun tahapan terbentuknya komunikasi antar personal adalah :

- (1) Tahap pembentukan hubungan, atau seringkali disebut sebagai tahap perkenalan. Tahap tersebut ditandai dengan adanya usaha dari kedua pihak untuk menangkap informasi dari reaksi kawannya, mulai dari identitas, sikap, serta nilai dari pihak lain. Apabila kedua belah pihak menemukan kecocokan maka akan terjadi pengungkapan diri, namun apabila tidak ada kecocokan maka masing-masing pihak akan berusaha menyembunyikan diri.
- (2) Tahap peneguhan hubungan. Komunikasi antar personal sifatnya tidaklah statis, akan tetapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan tersebut, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan pada keseimbangan. Ada empat faktor yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan ini, yaitu: (a) keakraban, merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, (b) kontrol, kedua pihak saling menyepakati tentang siapa mengontrol siapa dan bilamana, (c) respon yang tepat, dimana respon dari satu pihak harus ditanggapi dengan tepat oleh pihak lainnya: dan (d) nada emosional yang tepat.
- (3) Tahap pemutusan hubungan. Tahap terakhir ini muncul apabila terjadi (a) kompetisi, diantara pihak-pihak yang berhubungan. Salah satu pihak berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan pihak lain; (b) dominasi, dimana salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga pihak lain tersebut merasa bahwa haknya telah

dilanggar; (c) kegagalan, masing-masing pihak berusaha saling menyalahkan jika tujuan tidak tercapai; (d) provokasi, salah satu pihak terus melakukan sesuatu yang dia ketahui dapat menyinggung pihak lain; (e) perbedaan nilai, kedua pihak tidak sepakat dengan nilai-nilai yang mereka anut.

1.2 Tiga Konseptualisasi Komunikasi

Ada 3 kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu-arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. (John R. Wenburg & William E Wilmot juga Kenneth K Sereno dan Edward M. Bodaken).

1.2.1. Komunikasi sebagai *tindakan satu arah*

Suatu pemahaman populer mengenai komunikasi manusia adalah komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap-muka) ataupun melalui media. Misalnya, seseorang itu mempunyai informasi mengenai suatu masalah, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, orang lain mendengarkan, dan mungkin berperilaku sebagai hasil mendengarkan pesan tersebut, lalu komunikasi dianggap telah terjadi. Jadi komunikasi dianggap suatu proses *linear* yang dimulai dengan sumber atau pengirim dan berakhir pada penerima, sasaran atau tujuannya.

Pemahaman komunikasi sebagai proses searah sebenarnya kurang sesuai bila diterapkan pada komunikasi tatap-muka, namun mungkin tidak terlalu

keliru bila diterapkan pada komunikasi publik (pidato) yang tidak melibatkan tanya-jawab dan komunikasi massa –cetak dan elektronik- (untuk acara/program yang tidak interaktif).

1.2.2. Komunikasi sebagai *interaksi*

Pandangan ini menyetarakan komunikasi dengan suatu proses sebab akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan baik verbal maupun nonverbal, seseorang penerima bereaksi dengan memberi jawaban verbal atau menganggukkan kepala, kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respons atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya. Masing-masing dan kedua pihak berfungsi secara berbeda bila yang satu sebagai pengirim, maka yang satunya lagi sebagai penerima. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini selangkah lebih maju daripada pandangan pertama, yakni berkomunikasi sebagai tindakan satu-arah, namun pemahaman ini juga kurang karena mengabaikan kemungkinan bahwa orang-orang dapat mengirim dan menerima pesan pada saat yang sama.

1.2.3. Komunikasi sebagai *transaksi*

Kelebihan konseptualisasi komunikasi sebagai transaksi adalah bahwa komunikasi tersebut tidak membatasi komunikator pada komunikasi yang disengaja atau respon yang dapat diamati.

2. Partai Politik

Dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis, eksistensi dari suatu partai politik merupakan suatu keharusan. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal adalah dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*) dan damai. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa tidak ada sistem politik yang saat ini dapat berlangsung tanpa adanya partai politik dan sudah sewajarnya jika partai politik telah menjadi fenomena yang lazim dijumpai dalam setiap kehidupan politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik- (biasanya) dengan cara konstitusional- untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil (Miriam Budiharjo, 1977:161).

Anggota-anggota partai politik memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik –biasanya dengan cara konstitusional- untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiharjo, 1977:162).

Berdasarkan batasan-batasan di atas, tampak jelas bahwa basis sosiologis suatu partai adalah adanya ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Begitu juga Partai Keadilan Sejahtera. Basis sosiologis ini sangatlah penting dalam suatu partai. Karena tanpa adanya kedua elemen tersebut, partai tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dan para pendukungnya.

Miriam Budiharjo, membedakan tipologi partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai politik diklasifikasikan menjadi **partai massa** dan **partai kader** (Miriam Budiharjo, 1977:166). **Partai massa** mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Biasanya terdiri dari pendukung dari pelbagai aliran politik dalam masyarakat. Kelemahannya adalah masing-masing aliran cenderung memaksakan kepentingan masing-masing sehingga persatuan dalam partai lemah. Sedangkan **partai kader** mementingkan keketatan dalam organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai dakwah berbasis kader-partai kader berbasis massa yang memiliki pola kaderisasi yang sistematis. Alur kaderisasi yang dirumuskan, bertujuan untuk mencetak para anggotanya menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai teladan tertinggi. PKS memiliki pola pembinaan melalui beberapa wasilah (sarana) yang semuanya memiliki dan mengarah pada visi misi dan tujuan yang sama. Pola kaderisasi yang dibangun adalah :



Sejauh ini, Partai Keadilan Sejahtera memiliki sistem pembinaan yang menggunakan media kelompok-kelompok kecil, yang jumlah anggotanya 15-20 orang, dan ada hubungan interpersonal yang dibangun di dalam kelompok itu, di bawah bimbingan satu ustadz (pimpinan kelompok). Kelompok-kelompok kecil tersebut disebut dengan *usrah* (Ali Said Damanik, 2002:88). *Usrah* atau yang lebih dikenal dengan Ta'lim Rutin Kader (TRK) biasanya dilaksanakan secara rutin, semisal sepekan sekali atau bisa dua pekan sekali. Bagi PKS, media ini sementara adalah media yang paling efektif untuk merekrut kader dan memulai sistem kaderisasi.

PKS tampak sebagai partai yang perekrutannya melalui seleksi yang ketat. Begitupun dalam pengelolaan dan penjagaan kader-kadernya, PKS juga memberlakukan adanya pemecatan bagi kader-kadernya yang

bersalah atau menyeleweng, dengan disebut adanya mekanisme *uqubah* (hukuman/sanksi).

Keberadaan sebuah partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik (Miriam Budiharjo, 1977:163).

- a. Sarana komunikasi politik, yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern ada penggabungan pendapat (*interest articulation*).
- b. Sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*), yaitu merupakan proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan orang-orang tersebut mendapatkan sosialisasi fenomena partai politik dari partai.
- c. Sarana rekrutmen politik, yaitu berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) selain itu juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (*selection of leadership*).
- d. Sarana pengatur konflik, yaitu partai politik sebagai penengah perbedaan pendapat dalam demokrasi. Namun realisasinya sulit dilaksanakan.

Penting bagi kita untuk memahami secara lebih mendalam apakah sesungguhnya fungsi dasar dari partai politik, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

a. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.

Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Menurut Gabriel Almond, dalam bukunya Sosialisasi Politik, terdapat dua yang penting, yaitu: *pertama*, bahwa sosialisasi politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang. *Kedua*, Sosialisasi Politik dapat berwujud tranmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih fleksibel menerima pengaruh ajaran. (Fadillah Putra, 2003:12)

Sosialisasi politik tidak pernah berhenti tetapi berlangsung terus sepanjang usia. Begitu kita melihat atau melibatkan diri dalam kelompok-kelompok dan peranan-peranan sosial yang baru yang berbeda dengan pengalaman hidup yang kita alami cenderung mengubah perspektif seseorang.

b. Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

c. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai ataupun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada

partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya.

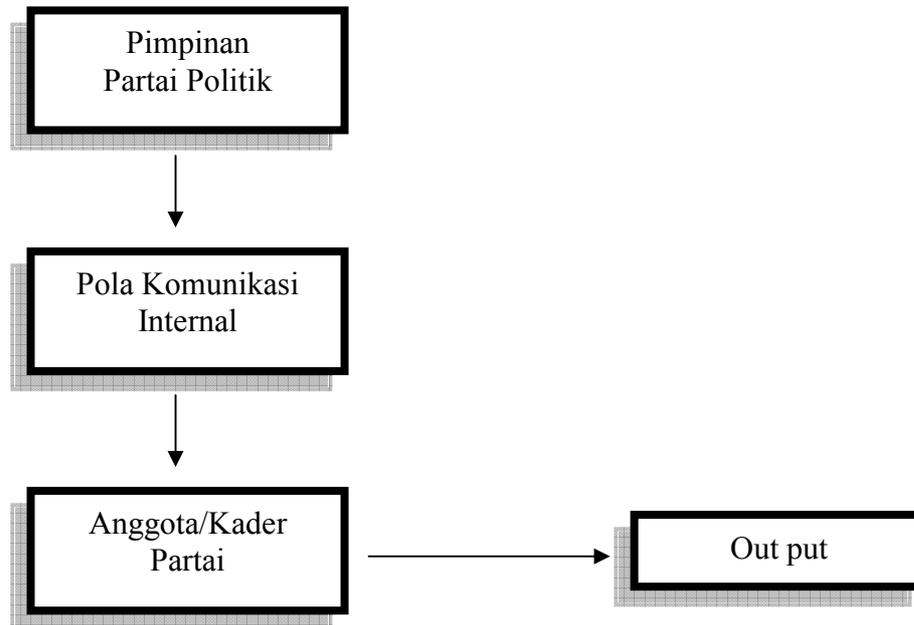
F. Kerangka Pemikiran

Aktivitas komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Begitupun dalam sebuah organisasi. Keberhasilan komunikasi antar komponen yang ada dalam organisasi akan berpengaruh terhadap capaian tujuan organisasi.

Partai politik, sebagai organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam jalur politik memerlukan pola komunikasi dan ineteraksi yang efektif agar fungsi dan tujuan partai. Baik fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, maupun rekrutmen politik.

Dalam sebuah partai politik tidak bisa dipungkiri bahwa komunikasi dan interaksi menjadi komponen yang sangat penting dan menjadi faktor pokok kesehatan organisasi. Karena itulah pola komunikasi dan interaksi tidak bisa dipisahkan dari kondisi personal dan kondisi keberjalanan partai politik tersebut.

Berikut adalah skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai suatu penelitian deskriptif, penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Jalaluddin Rakhmat, 1995). Sementara data kualitatif diperoleh dari pengolahan informasi yang diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara dan sumber data sekunder melalui dokumen resmi terkait.

Menurut Jalaluddin Rakhmat, penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif bertujuan:

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku
- c. Membuat perbandingan
- d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang

Penelitian ini mempunyai kelemahan pada representativitas sehingga hasil penelitian ini hanya berlaku pada obyek yang diteliti saja yaitu kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta dan tidak bisa digeneralisasikan pada partai lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1990:64).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah:

Surakarta merupakan daerah yang secara kultural sangat subur dengan berbagai komunitas atau kelompok yang bersifat ideologis ataupun kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok tersebut terdiri dari ormas-ormas Islam, LSM-LSM, parpol-parpol Islam, parpol-parpol nasionalis, organisasi-organisasi kemahasiswaan, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya yang turut menyuburkan dinamisasi perpolitikan di Surakarta. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi tersebut memiliki dinamisasi yang cukup tinggi jika dilihat dari aktivitas pencapaian tujuan yang mereka lakukan. Terutama jika kita melihat perkembangan ormas-ormas Islam, maka kita dapat mengamati terdapat banyak ormas Islam yang eksistensinya sudah begitu mengakar pada kehidupan masyarakat Surakarta. Di antara ormas tersebut adalah Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Nahdlatul Ulama (NU), dan berikot turunan-turunan dari organisasi tersebut. Setiap ormas Islam tersebut cukup aktif dalam aktivitas dakwah, berikot juga dalam masalah kaderisasi. Dalam kondisi seperti ini, maka akan terjadi sebuah kompetisi yang cukup ketat dalam aktivitas pencapaian tujuan organisasi.

Dalam masalah kepartaian, Surakarta merupakan daerah yang sangat subur dengan kehidupan partai. Partai-partai yang terdapat di

Surakarta cukup heterogen dari mulai partai-partai yang berbasis nasionalis, sosialis, sampai pada partai yang berbasis keagamaan. Dalam perjalanannya, partai-partai tersebut sudah mampu menunjukkan eksistensi dirinya, bahkan berkiprah dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Tidak hanya partai-partai nasionalis yang pernah malang melintang di era orde baru saja yang mampu hidup dan menunjukkan geliatnya, namun partai-partai yang baru berdiri pun sudah mampu menjalankan perannya dalam kancah perpolitikan daerah. Hal ini bisa terjadi karena Surakarta secara *sosio cultural* merupakan daerah yang cukup kaya dengan para intelektual muda yang mempunyai pemikiran dan idealisme yang cemerlang, begitu pula disertai dengan semangat yang tinggi untuk proses perubahan. Hal ini tidak mengherankan, karena Surakarta merupakan daerah pendidikan, dimana banyak lembaga pendidikan tinggi berdiri di sana.

Kehidupan perpolitikan di Surakarta juga diwarnai oleh suburnya kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan yang ada, tidak hanya terfokus kepada permasalahan internal kampus. Namun lebih dari itu sangat kontributif dalam mengkritisi kehidupan pemerintahan baik di daerah maupun nasional. Kegiatan-kegiatan mahasiswa semacam diskusi, seminar, pemberitahuan, dan sejenisnya, cukup memberikan pewacanaan dan pencerdasan bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan aksi mahasiswa juga mampu menjadi sebuah *pressuer* bagi pemerintahan, yang biasanya mahasiswa melakukannya melalui aksi demonstrasi.

Pertimbangan lain adalah, bahwa PKS (Partai Keadilan Sejahtera) merupakan partai kader berbasis massa yang tampak memiliki budaya berbeda dengan partai-partai lain di Surakarta. Dari pola mekanisme perekrutan, pola komunikasi, maupun *bi'ah* (lingkungan). Bahkan interaksi internal kadernya. PKS juga memiliki kesan sebagai partai politik yang memiliki keberimbangan antara pola kaderisasi dan pendidikan politik. Karena itulah, penelitian ini memilih DPD (Dewan Pengurus Daerah) PKS Kota Surakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*in-depth interviewing*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang. Melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Deddy Mulyana, 2004:180). Wawancara mendalam adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang open bersifat "*open-ended*" dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh dan mendalam (HB Sutopo, 1998:59).

Dalam penelitian ini, teknik wawancara akan dilakukan pada semua informan baik dari unsur pengurus maupun anggota DPD PK Sejahtera Kota Surakarta dan unsur yang lain.

b. Observasi Tak Berstruktur

Observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang terjadi. Tak terstruktur artinya adalah tidak sepenuhnya melaporkan peristiwa; sebab prinsip utama dalam observasi adalah merangkumkan, mensistematiskan, dan menyederhanakan representasi peristiwa. Metode dalam observasi tak terstruktur terdiri atas catatan lapangan, catatan spicemen dan anekdot (Jalaluddin Rakhmat, 1995:84-86).

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah catatan lapangan terkait personil yang ada di lapangan baik pengurus maupun anggota. Mengetahui pola seperti apa yang mereka lakukan dalam komunikasi.

c. Dokumentasi

Dokumen dan arsip merupakan sumber informasi dalam memahami suatu peristiwa (Jalaluddin Rakhmat, 1995:69). Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta.

4. Sumber Data

Data yang akan digali meliputi:

1. Sumber data primer, yaitu meliputi hasil wawancara dengan informan, yaitu pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta.
2. Sumber data sekunder, yaitu meliputi dokumen atau arsip Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta.

5. Sampling

Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan memilih responden yang dianggap tahu dan dipercaya sebagai sumber data dan mengetahui persoalan penelitian secara mendalam.

Adapun sample yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur lain yang dibutuhkan.

6. Validitas Data

Untuk memeriksa keabsahan data akan digunakan triangulasi data, yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data (Lexy J Moleong, 1995). Dalam hal ini data-data yang diperoleh dari pengurus maupun

anggota Partai Keadilan Surakarta (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta akan dibandingkan dengan data-data yang lain. Dengan demikian data yang diperoleh menjadi valid dan meyakinkan.

7. Teknis Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif (Miles & Huberman, 1984). Analisis interaktif akan lebih bermanfaat bagi penelitian yang cenderung bersifat deskriptif maupun eksplanatif (HB. Sutopo, 1998:145). Dalam model analisis interaktif terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen analisis ini berinteraksi dengan proses pengumpulan sebagai proses siklus. Adapun langkah dalam melakukan proses analisis interaksi akan diawali dengan pengumpulan data, yang dilanjutkan dengan reduksi data. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang diperoleh dari lapangan, sehingga sesuai dengan fokus penelitian.

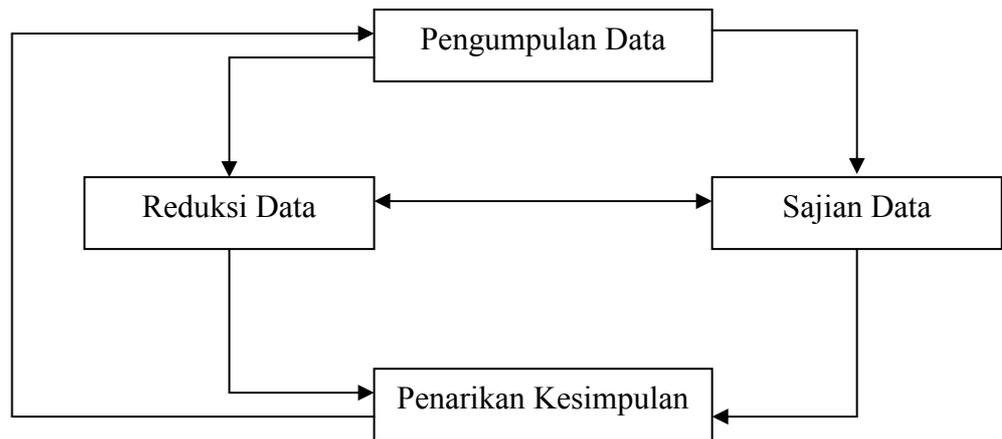
Langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu berupa cerita sistematis dari data yang diperoleh, yang disertai dengan matriks sebagai pendukung sajian data. Setelah proses pengumpulan data berakhir, selanjutnya dilakukan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dari semua data yang telah terverifikasi.

Proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan sebuah siklus yang dilakukan hampir bersamaan

dan terus menerus. Untuk lebih jelasnya, proses analisis interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :

Model Analisis Interaktif (Miles & Huberman)

(H.B. Sutopo, 1998:37)



BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Latar Belakang Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera

Salah satu kebijakan pemerintah orde baru yang sangat fenomenal adalah penetapan ideologi Pancasila sebagai ideologi tunggal kehidupan sosial politik masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No.3 dan 8 tahun 1985. Kebijakan ini bergulir dalam rangka menghilangkan perbedaan ideologis dari berbagai kelompok masyarakat, sehingga kondisi stabilitas nasional bisa tetap terlestarikan. Adanya aneka ragam ideologi yang dianut setiap kelompok masyarakat, dipandang sebagai bibit perpecahan yang akan mengganggu stabilitas nasional. Selain itu adanya perbedaan ideologi di kalangan masyarakat akan mengancam kestabilan jalannya roda pemerintahan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perbedaan ideologi antara negara dengan suatu kelompok masyarakat akan mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat tersebut terhadap negara, dan ini akan menghambat jalannya pemerintahan.

Dalam rangka stabilitas nasional ini pula, sebelum digulirkannya UU tersebut, pemerintah orde baru telah melakukan penyederhanaan partai. Langkah ini kemudian diikuti dengan upaya penyeragaman asas partai politik dalam satu asas tunggal Pancasila. Pemberlakuan asas tunggal ini pula tidak hanya dikenakan pada kehidupan partai politik, namun lebih luas diberlakukan terhadap seluruh kehidupan organisasi berdiri. Organisasi-organisasi yang

berdiri dan tidak menggunakan asas tunggal Pancasila dianggap subversif, membahayakan negara, sehingga harus “ditumpas” eksistensinya. Dengan kata lain, pemerintah orde baru tidak memberikan celah terhadap adanya perbedaan yang sifatnya fundamental.

Kebijakan pemberlakuan asas tunggal dan model pembangunan yang menekankan pada stabilitas kehidupan politik pada pemerintahan orde baru di satu sisi membawa dampak yang cukup baik pada kehidupan negara. Amin Rais mencatat enam keberhasilan dari pemerintah orde baru dengan kebijakan seperti ini, di antaranya pencapaian pembangunan ekonomi yang relatif sangat baik dengan angka-angka pertumbuhan yang dicapainya setiap tahun, pencapaian kestabilan politik yang cukup mantap, mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang majemuk, prestasi berswasembada pangan (*self suffi-cient*), membaiknya citra Indonesia di dunia, dan sebagai negara berkembang Indonesia cepat mencapai teknologi tinggi (Ali Said Damanik, 2002:50).

Namun di sisi lain, ternyata kebijakan pemberlakuan asas tunggal cukup mengganggu eksistensi organisasi-organisasi yang ada pada saat itu, terkhusus di dalamnya organisasi-organisasi massa Islam. Sudah sejak lama kekuatan Islam dipandang serius oleh pemerintah. Kekuatan Islam sejak lama merupakan sebuah kekuatan yang sangat potensial untuk membuat gerakan yang biasanya akan selalu berlawanan dengan arah atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Lebih jauh ternyata kekuatan tersebut mengarah kepada gerakan perlawanan dan pemberontakan. Hal ini muncul karena adanya

sebuah keinginan yang sangat fundamental, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.

Pemerintah Orde Baru memandang bahwa ideologi yang berbasis keagamaan pada suatu organisasi akan sangat mudah memunculkan semangat perlawanan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memandang tepat untuk adanya penyatuan yang sifatnya fundamental berupa penyeragaman ideologi. Pada kondisi dimana setiap organisasi menerapkan asas Pancasila, maka semangat perlawanan pada pemerintah yang tumbuh dari nilai-nilai ajaran agama akan mampu diredam. Setelah itu, maka langkah selanjutnya adalah mengarahkan kehendak dan pandangan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan kehendak pemerintah.

Dalam mengarahkan kehendak dan pandangan masyarakat tersebut, pemerintah Orde Baru menerapkan gagasan sekularisasi dalam kehidupan negara. Pemerintah memandang bahwa masalah agama adalah urusan individual dan tidak ada relevansinya dengan urusan politik kenegaraan. Agama hanyalah sebagai modal dasar dalam menentukan arah perubahan sosial, namun tidak memiliki hubungan struktural dengan institusi kenegaraan. Pandangan seperti ini cukup efektif dalam mendoktrin masyarakat dalam melakukan setiap aktivitasnya untuk mengesampingkan ajaran agama dalam setiap hubungan sosialnya.

Beragam respon yang dilontarkan umat Islam terhadap kebijakan penyeragaman ideologi itu. Respon tersebut di antaranya berbentuk penerimaan, sikap apatis, dan sikap penolakan. Di antara yang menolak

kebijakan tersebut adalah organisasi mahasiswa Islam, seperti halnya Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamatan Organisasi (HMI-MPO) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Dua organisasi kaum muda Islam ini menolak dengan tegas tanpa kompromi pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Kedua organisasi inilah yang kemudian mempunyai peran yang cukup signifikan bagi kemunculan gerakan-gerakan kampus. Sikap penolakan tanpa kompromi terhadap pemberlakuan asas tunggal itu membuahkan tindakan keras dari pemerintah Orde Baru saat itu, yaitu berupa “pembubaran” Pelajar Islam Indonesia (PII) dan dianggap terlarang melalui Surat Keputusan Mendagri No.120 tahun 1987.

Pembubaran secara formal Pelajar Islam Indonesia (PII) tidak menjadikan mereka berhenti dari perjuangannya. Mereka melakukan gerakan-gerakan “bawah tanah” dalam membina kaum-kaum muda Islam. Dalam situasi yang cukup menegangkan dan statusnya yang ilegal, maka pembinaan-pembinaan yang dilakukan pula sangat sarat dengan muatan-muatan ideologis. Dari pembinaan-pembinaan yang dilakukan itu menghasilkan kader-kader muda militan yang mempunyai semangat dan pengorbanan yang besar dalam menentang kebijakan pemerintah yang sangat kontroversial tersebut.

Seiring dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PII dan HMI-MPO, muncul pula *trend* gerakan Islam yang lebih ekstrim, yang berupa kelompok-kelompok informal seperti *usrah*, *halaqoh*, jamaah, dan lain-lain. Gerakan ini bersifat radikal, eksklusif dan cenderung tidak mempunyai toleransi terhadap kelompok lain. Sayangnya gerakan ini tidak memiliki

sarana organisasi sebagai alat perjuangannya, dan hanya terpusat di masjid. Mereka anti pemerintah dan memiliki solidaritas komunal yang kuat. Perkembangan gerakan ini tidak secepat gerakan yang dilakukan oleh PII dan HMI-MPO, yang walaupun sama merupakan gerakan bawah tanah, namun PII dan HMI-MPO mempunyai organisasi formal sebagai sarana perjuangan. Dengan demikian kondisi ini menjadikan PII dan HMI-MPO bisa fleksibel untuk keluar masuk masjid kampus dalam melakukan pembinaannya.

Kebijakan NKK/BKK yang digulirkan pada awal tahun 1980-an semakin mempersempit ruang gerak dari gerakan mahasiswa. Semua aktivitas kampus yang berbau politis harus disingkirkan dan tidak boleh hidup di tengah-tengah kehidupan kampus. Aktivitas politik menjadi suatu wilayah “terlarang” bagi para aktivis mahasiswa termasuk bagi para aktivis dakwah kampus. Aktivitas dakwah kampus pada saat itu lebih berorientasi pada pemurnian ajaran dan pemikiran Islam, daripada gerakan yang berorientasi politik. Gerakan-gerakan yang mereka jalankan harus berada pada koridor gerakan moral, tanpa ada misi-misi politik di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah orde baru sangat *concern* pada upaya-upaya pengidentifikasian gerakan-gerakan mahasiswa yang dipandang menyimpang dari konsep NKK/BKK. Pemerintah menyebar intel-intel untuk mendeteksi adanya penyimpangan pada aktivitas kampus. Ketika terdapat gejala-gejala yang dinilai menyimpang dan membahayakan kehidupan pemerintah, maka pemerintah langsung melakukan “pencidukan” terhadap mahasiswa-mahasiswa motor penggerak dari gerakan tersebut.

Dalam kondisi yang penuh kekangan tersebut, bermunculanlah kelompok-kelompok studi Islam, yang secara tidak langsung membawa pencerahan baru bagi aktivitas dakwah kampus. Forum-forum studi yang terbentuk berpengaruh pada perkembangan ke-Islaman dalam berbagai bidang kehidupan dan implementasi nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung pula forum-forum studi tersebut telah memperkuat komitmen keislaman mereka yang tercermin pada moralitas dan keteguhan dalam menjalankan ajaran agama. Pada saat itu sudah marak fenomena wanita berjilbab yang menjadi pemandangan umum di kampus-kampus, kantor-kantor, dan di masyarakat. Bermula dari sini, aktivitas dakwah kampus mulai menyebar mewarnai suasana kehidupan kampus dan masyarakat umum.

Geliat dakwah kampus cukup menggema dalam kehidupan masyarakat kampus. Gerakan dakwah ini berusaha membangun seluruh sisi kehidupan masyarakat kampus. Gerakan dakwah ini berusaha membangun seluruh sisi kehidupan masyarakat. Dalam upaya membangun ruh ke-Islaman, mereka berusaha menghadirkan kajian-kajian umum, seminar, beserta aktivitas-aktivitas sosial, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Dalam bidang politik mereka berusaha memberikan penyadaran kepada masyarakat, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa, akan tanggungjawabnya terhadap masa depan bangsa Indonesia. Penyadaran ini bermula dari kesadaran akan fenomena kerusakan moral yang demikian kronis pada tubuh pemerintahan orde baru pada saat itu. Praktek-praktek korupsi,

kolusi, dan nepotisme sudah sedemikian mengkultur pada para pejabat negara, yang ternyata membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan masyarakat. Hal ini telah menimbulkan keresahan pada kehidupan masyarakat dan menggugah aksi perlawanan mahasiswa, khususnya para aktivis dakwah. Oleh karena itu para pemuda dan mahasiswa muslim aktivis gerakan dakwah bersatu padu menyusun kekuatan untuk mengadakan proses perubahan terhadap kondisi yang ada pada saat itu. Aksi perlawanan ini sampai pada klimaksnya pada bulan Mei 1998 berupa penggulingan rezim Soeharto dari pemerintahan.

Lengsernya Soeharto bukan berarti menandai berakhirnya perjuangan menggapai cita-cita dakwah untuk mengubah kondisi bangsa dan negara. Namun ini hanyalah sebagai pintu gerbang untuk mengawali proses perubahan kehidupan bangsa dalam seluruh aspek kehidupannya. Kondisi negara pasca lengsernya Soeharto bukan berarti Indonesia terlepas dari segala permasalahan yang ada sebelumnya. Pada masa itu pengelolaan negara baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih banyak terpengaruh budaya orde baru, yaitu masih mengkulturkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Walaupun pada saat itu pintu kebebasan sudah terbuka begitu lebar, namun kontrol masyarakat dalam hal ini terutama para aktivis dakwah kampus masih mempunyai posisi tawar yang lemah terhadap para penyelenggara negara. Berangkat dari kondisi seperti ini, maka muncullah pemikiran tentang perlunya membangun institusi kuat yang mempunyai daya tawar yang baik terhadap pemerintah. Pada akhirnya, wacana ini cukup

mengkristal dalam gagasan-gagasan para aktivis dakwah kampus, sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa pada suasana kebebasan yang terbentuk itu, perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai cita-cita dakwah Islam. Institusi sebagai pengontrol negara dan juga sebagai sarana perjuangan dakwah, pada akhirnya berwujud sebagai sebuah partai politik (parpol).

Sebagai sarana perjuangan dakwah, maka partai yang terbentuk adalah partai yang berorientasi perluasan dakwah Islam. Berkaitan dengan fungsinya sebagai sarana untuk mencapai dakwah Islam, maka partai yang terbentuk pun didirikan dengan cara demokratis, inklusif, dan diupayakan bisa diterima oleh masyarakat. Berawal dari gagasan-gagasan itu, maka secara resmi pada tanggal 20 Juli 1998 (26 Rabi'ul Awwal 1419 H), didirikanlah sebuah partai politik yang diberi nama Partai Keadilan (PK). Adapun pengukuhan dalam bentuk deklarasi oleh Dewan Pendiri Partai dilakukan pada hari Ahad, 9 Agustus 1998 yang bertempat di Masjid Al-Azhar Jakarta. Dewan Pendiri Partai berjumlah 50 orang dengan diwakili oleh Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, dan H. Luthfi Hasan Ishaq, MA. Deklarasi Partai Keadilan tersebut dihadiri oleh sekitar 20 ribu massa pendukungnya.

Dalam perjalanannya, Partai Keadilan cukup berhasil menata jaringan dan dukungan dari berbagai elemen. Dukungan utama terhadap partai ini adalah dari kalangan muda aktivis Islam kampus. Hal ini tidak mengherankan karena para pendiri partai ini memiliki latar belakang aktivis muda Islam kampus. Selain dukungan dari kalangan muda Islam kampus tersebut, Partai Keadilan juga mampu mengumpulkan dukungan dari basis

massanya yang ada dalam tubuh Muhammadiyah, NU, Persis (Persatuan Islam), pesantren-pesantren, kalangan profesional, dan sebagainya. Yang terlihat menarik adalah bahwa Partai Keadilan telah berhasil dalam mengkonsolidasikan kader-kadernya yang berbeda latar belakangnya sejak lama. Oleh karena itu, wajar kiranya apabila dalam waktu singkat, Partai Keadilan berhasil menata jaringan dengan rapi sampai ke tingkat bawah.

Pada saat pendiriannya, Partai Keadilan mengklaim telah menjaring kader di 21 perwakilan di 21 propinsi dan 200 cabang di tingkat II. Partai Keadilan juga mengklaim telah mempunyai kader aktif yang dapat diandalkan secara riil mencapai 200 orang. Dalam tempo beberapa bulan sudah terbentuk 25 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkat propinsi. Selanjutnya di tingkat II sudah berdiri 200 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 400 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan (Ali Said Damanik, 2003:265).

Dengan dukungan dan jaringan yang cukup besar bagi sebuah partai baru tersebut, maka Partai Keadilan berhasil lolos menjadi salah satu kontestan Pemilu 1999. Perolehan suara yang diraih oleh Partai Keadilan cukup mengejutkan. Sebagai partai baru yang tidak mempunyai pengalaman masa lalu dan tidak memiliki tokoh bertaraf nasional, ternyata Partai Keadilan berhasil menjadi tujuh partai besar dalam pemilu 1999 tersebut. Adapun jumlah suara yang diperoleh Partai Keadilan pada pemilu 1999 adalah sekitar 1,36 % dari keseluruhan jumlah suara. Dengan jumlah perolehan suara tersebut, Partai Keadilan memiliki wakil di legislatif sebanyak tujuh orang

yang tergabung dalam Fraksi Reformasi. Namun demikian, dengan jumlah suara tersebut, Partai Keadilan tidak mampu menembus ketentuan *electoral threshold*, yaitu batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2% atau sepuluh kursi di DPR. Dengan ketentuan tersebut, sudah bisa dipastikan Partai Keadilan tidak bisa lagi menjadi kontestan pemilu pada tahun 2004.

Hadirnya ketentuan *electoral threshold* tidak menyurutkan langkah Partai Keadilan dalam gerak perjuangannya. Kehadiran Partai Keadilan sejak awal bukan hanya berorientasi sebagai alat untuk mengikuti pemilu dan mencapai kekuasaan, namun orientasi utama adalah sebagai sarana perjuangan dakwah. Karena itu, Partai Keadilan tidak hanya berstatus sebagai partai politik, namun juga berstatus sebagai partai dakwah. Dengan demikian lolos tidaknya Partai Keadilan sebagai peserta pemilu pada pemilu 2004 tidak mempengaruhi eksistensinya sebagai sebuah partai. Namun demikian, perjuangan dakwah akan sangat produktif jika dilakukan dengan memasuki atau melalui lembaga parlemen ataupun pemerintahan. Oleh karena Partai Keadilan tetap berusaha untuk terus ikut berkiprah, terutama untuk menembus pemilu 2004.

Setelah melalui berbagai pemikiran dan pertimbangan, maka tibalah pada sebuah keputusan, bahwa dalam rangka mempertahankan kiprah partai dalam arena perpolitikan, dan pula dalam rangka mempertahankan dan menegakkan dakwah di lingkungan kekuasaan negara, maka perlulah kiranya dibentuk institusi baru untuk melanjutkan perjuangan dari Partai Keadilan. Institusi politik baru, sebagai penerus perjuangan Partai Keadilan tersebut

bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai baru ini secara resmi dideklarasikan pada hari Ahad, 20 April 2003 (9 Jumadil 'Ula 1423 H) di lapangan Monas Jakarta. Pada saat itu pula disampaikan pernyataan resmi dari Presiden Partai Keadilan, bahwa Partai Keadilan secara resmi bergabung dan siap dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan terbentuknya PKS, dan bergabungnya Partai Keadilan ke dalamnya, maka secara otomatis seluruh kader Partai Keadilan menjadi kader PKS. Dengan wajah baru ini, maka PKS bertekad untuk maju menjadi kontestan pemilu tahun 2004 dan berusaha untuk melampaui ketentuan *electoral threshold*. Keinginan ini tidak berlebihan, karena PKS sebagai penerus dari Partai Keadilan telah memiliki jaringan struktural yang lebih luas.

1. Landasan Filosofis

Pendirian Partai Keadilan Sejahtera tidak lepas dari tujuan untuk mencapai cita-cita perjuangan dakwah. *Harakatul Islam* (gerakan perbaikan) yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan negara memerlukan institusi politik yang mempunyai kekuatan untuk ikut andil dalam menentukan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan partai merupakan pilihan yang lebih tepat dalam rangka eksistensi perjuangan dakwah.

Partai politik merupakan sarana untuk menata kekuatan dan strategi perjuangan untuk mencapai cita-cita dakwah. Adanya institusi formal ini akan menjadi wadah konsolidasi kekuatan dan penentuan strategi perjuangan, sehingga aktivitas dakwah menjadi lebih sistematis

dan produktif. Banyaknya unsur kekuatan dakwah yang sudah dimiliki tidak akan menghasilkan perubahan kehidupan bangsa yang signifikan, tanpa adanya pengaturan barisan dengan orientasi dan perencanaan yang jelas. Oleh karena itu, partai ini didirikan dalam rangka membangun kesadaran umat terhadap eksistensi dirinya dan menghimpunnya dalam sebuah barisan yang solid, kuat dan teratur.

PKS mencoba menawarkan model sebuah partai yang modern yang tetap memegang teguh nilai-nilai Islam. Sebagai partai dakwah, PKS tidak hanya berorientasi untuk turut serta dalam pemilihan umum, namun lebih jauh berorientasi pada perluasan dakwah dalam rangka mengembalikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, partai ini tidak akan bubar hanya karena kalah dalam jumlah perolehan suara dalam pemilu. Pemilihan umum hanyalah sebagai *wasilah* (sarana), bukan sebagai tujuan dari keberadaan PKS. Tujuan utama yang akan diraih adalah mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhoi Allah SWT.

Orientasi dari keberadaan partai yang tidak hanya menuju pemilu dan kursi kekuasaan merupakan suatu hal yang tidak cukup lazim dalam budaya perpolitikan Indonesia. Terlebih lagi bertujuan sebagai sarana kegiatan dakwah., yang nilai dan budaya yang sudah mereka bangun selama ini dalam kegiatan dakwahnya, belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera sulit untuk diidentikkan dengan keberadaan partai-partai lainnya di masa lalu. Karena

hampir bisa dipastikan bahwa partai-partai lain yang didirikan, hanya mempunyai orientasi untuk mengikuti pemilu dan meraih kursi kekuasaan. Pada partai-partai tersebut kurang dipentingkan masalah penggarapan kader secara intensif, kecuali partai tersebut mempunyai visi dan misi yang jauh dari sekedar ikut pemilu.

2. Karakteristik

Ada tujuh karakteristik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai dengan apa yang tertuang dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat. Tujuh karakter tersebut adalah moralis, profesional, patriotic, moderat, demokrat, reformis, dan independen.

a. Moralis

Sebagai sebuah partai yang memiliki semangat dan berlandaskan pada nilai-nilai ke-Islaman, maka aspek moralitas ditempatkan pada karakter pertama partai. Islam sebagai agama dan pedoman hidup yang lengkap dan sempurna, tentunya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur umatnya dalam masalah kegiatan ritual ibadah. Sebagai pedoman hidup, Islam juga mengatur masalah ekonomi, hukum, politik, kebudayaan, pendidikan, dan termasuk juga di dalamnya masalah ibadah ritual. Islam merupakan jalan hidup yang total dan *tawazun* (seimbang), yang tidak hanya mengatur aktivitas yang berorientasi *ukhrawi*, namun juga mengatur masalah-masalah duniawi.

Sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam juga memberikan bimbingan dan menjadi pedoman dalam kehidupan politik.

Politik merupakan salah satu bagian terpenting dalam Islam. Dalam melakukan aktivitas politik ini, setiap muslim terikat dan harus mengacu pada etika ataupun norma yang telah digariskan. Setiap muslim dilarang untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan amanah, harus menjadi landasan dalam kiprah seorang muslim dalam kiprah berpolitik.

b. Profesional

Profesional bercirikan pada penguasaan detail masalah yang akan mengantarkan partai pada kebijakan-kebijakan yang bertanggung jawab atas berbagai masalah yang dihadapi, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pembentukan pribadi dengan memperhatikan intelektualitas, sikap kritis, dan sensitivitas, mendapatkan perhatian yang lebih dalam aktivitas partai ini (Ali Said Damanik, 2002: 242).

Profesional yang terbentuk tidak bisa dilepaskan dari karakter moral. Dengan kata lain profesionalitas yang tumbuh dari kondisi yang penuh kebebasan harus senantiasa dikendalikan oleh rasa tanggung jawab pribadi. Dengan rasa tanggung jawab ini maka segala bentuk penyelewengan, anarki, dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dapat dihilangkan dari mulai lingkup organisasi.

c. Patriotik

Hidup berpartai, bagi kader PKS adalah *jihad siyasi* (jihad dalam politik). Jihad dalam politik merupakan perjuangan menegakkan dakwah Islam melalui arena perpolitikan. Karena itu jihad politik merupakan

sebuah kewajiban bagi kader dalam rangka memperjuangkan dakwah Islam melalui medan *siyasa* (politik). Pemahaman dan keyakinan seperti ini telah terpatri dalam pribadi kader, sehingga mereka siap mengerahkan segenap kemampuan untuk menjayakan partai. Hal ini tidak mengherankan karena jiwa patriotik sesungguhnya merupakan sebuah karakter yang dibangun sejak lama dalam tubuh Partai Keadilan, atau bahkan sebelum berdirinya Partai Keadilan, melalui proses *tarbiyah* (pembinaan).

d. Moderat

Sikap moderat merupakan sesuatu sikap yang alamiah. Bahwa alam ini diciptakan dengan segala keseimbangan dan keadilannya. Kehidupan alam semesta tidak hanya mengutamakan satu sisi kehidupan saja, namun secara komprehensif memperhatikan seluruh segi kehidupan. Oleh karena itu, sikap pertengahan merupakan sebuah sikap yang alamiah, dimana pemikiran, pandangan dan sikap moderasi, berimbang dan pertengahan, serta saling melengkapi bagi manusia dan kehidupan merupakan sikap objektif yang selaras dengan tata alamiah. Sikap semacam ini merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah yang telah menjadi ciri umat pilihan, umat yang jauh dari sikap berlebih-lebihan dan pengabaian.

e. Demokrat

Berkaitan dengan karakter ini, Partai Keadilan Sejahtera menerima nilai-nilai universal dari demokrasi, yang *notabene* bukan nilai yang

berasal dari Islam. Nilai dan semangat demokrasi dalam kondisi bangsa yang ada saat ini lebih memungkinkan masyarakat leluasa dalam menyikapi pendapat, mengekspresikan diri dan menyalurkan potensinya membentuk kekuatan kebersamaan. Nilai demokrasi yang beresensikan pada pembentukan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun perlu diingat bahwa penyelenggaraan Negara di sini didasarkan pada nilai-nilai *syuro*, dimana penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah Negara di dasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah.

f. Reformis

Partai Keadilan Sejahtera menempatkan dirinya sebagai partai reformis yang berupaya konsisten menjauhkan diri dari sifat-sifat atau karakter-karakter yang menyimpang dan menimbulkan kerusakan. Karakter reformis pada diri Partai Keadilan Sejahtera berawal dari kualitas pribadi kader yang mampu menampilkan *shaksiyah* (kepribadian) Islam dalam berbagai segi kehidupan. Partai Keadilan Sejahtera berprinsip bahwa persoalan politik sama pentingnya dengan pembinaan pribadi para calon politikus. Oleh karena itu aktivitas kaderisasi pada partai ini menjadi aktivitas utama yang terus dilakukan secara intensif. Tidak heran kalau partai ini sering disebut sebagai partai kader.

g. Independen

Definisi independen atau merdeka yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera, adalah seperti halnya yang dikemukakan oleh seorang

panglima perang Islam, Ribi' bin Amir di hadapan panglima Rustum, “Aku datang diutus untuk membebaskan manusia menuju penghambaan kepada Allah semata, dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia-akhirat, dan dari tirani agama-agama menuju keadilan Islam”. (Ali Said Damanik, 2002:255). Dengan prinsip kemerdekaan ini, maka kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan yang dipunyai dan dicita-citakan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah tidak terbatas oleh perbedaan etnis, ras, suku, status sosial, dan agama.

3. Paradigma

Terminologi yang muncul di tengah kehidupan modern untuk menggambarkan aktivitas perubahan sosial terencana adalah pembangunan. Sejak akhir tahun lima puluhan dan akhir tahun enam puluhan, pembangunan di sama artikan dengan kemajuan dan modernisasi. Menurut konsep ini, perbaikan lingkungan fisik atau kemajuan material merupakan fokus dari aktivitas pembangunan. Negara sedang berkembang atau negara terbelakang diartikan sebagai negara yang dalam bidang industri, ekonomi, teknologi, kelembagaan dan kebudayaan sedang berusaha untuk maju meniru model negara maju di Barat.

Implementasi konsep pembangunan semacam itu, akan menihilkan perlindungan terhadap lima aspek utama kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan). Karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam atas konsep pembangunan yang akan diterapkan. Urbanisasi dan industrialisasi melahirkan masalah kebodohan, kemiskinan,

pengangguran, kelaparan dan rasa tidak tenteram. Beberapa analisis mutakhir atas dampak ideologi *developmentalisme* Barat memperlihatkan suatu simpulan, bahwa pembangunan telah menyeret manusia, kepada enam ancaman serius: industri yang tak terkendali; mengeringnya sumber-sumber alam (seperti energi, hutan, pangan dan air); tekanan perkapita yang telah melampaui titik kritis atas tanah dan lingkungan; limbah industri dan rumah tangga yang terus bertambah; perlombaan senjata nuklir, kimia dan biologi; dan pertumbuhan serta persebaran penduduk dunia secara tidak terkendali. Dalam semua itu, manusia lebih diposisikan sebagai alat pembangunan.

Bangsa Indonesia harus segera merumuskan ulang paradigma pembangunannya dengan menyaring konsep yang datang dari luar secara kritis dan tepat, dan berani mengungkapkan gagasan-gagasan orisinalnya.

Pancasila sebagai dasar negara, secara konseptual mengandung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (*tauhid*), demokrasi (*syura*), hak asasi manusia (*maqasid syariah*), pluralitas persatuan dan kesatuan, dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan idiil kehidupan bersama bangsa Indonesia.

Tujuan didirikannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera pasal 5, yaitu:

1. Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan
2. Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Partai Keadilan Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke, yang dilalui garis khatulistiwa.

4. Prinsip Dasar

Sebagai industri kepartaian yang memiliki agenda politik, ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan Partai Keadilan Sejahtera, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadilan, persamaan dan keseimbangan, adalah pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak politik dan sosial setiap manusia yang memiliki kedudukan hukum dan undang-undang yang sama, meski berbeda suku, warna kulit, dan agama, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Kesatuan nasional, yaitu memperkokoh struktur negara sambil tetap menjaga integritas dan persatuan nasional. Memandang pluralitas rakyat dan realitas hukum serta kekayaan alam sebagai kenyataan alamiah yang harus dihormati secara proporsional.

- c. Kemajuan, adalah membangun kesadaran sejarah, kesadaran tentang realitas dan kesadaran tentang keharusan melakukan perbaikan sebagai perwujudan kewajiban sebagai makhluk moral dalam melaksanakan misi untuk membangun peradaban.
- d. *Khidmatul Ummah* demi persatuan, adalah upaya menjadi jembatan berbagai kelompok, organisasi atau partai-partai Islam dalam mewujudkan persatuan umat.
- e. Kerjasama internasional, yaitu menjalin interaksi dengan bangsa lain dalam rangka menandakan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, mengakui hak-hak bangsa-bangsa dalam kehidupan bersama yang saling menghormati dan saling bekerja sama untuk meningkatkan kemajuan, pertumbuhan, dan pemakmuran bumi yang dilandasi rasa keadilan.

5. Visi dan Misi

a. Visi Umum

Sebagai Partai Dakwah Penegak Keadilan dan Kesejahteraan Dalam Bingkai Persatuan Ummat dan Bangsa.

b. Visi Khusus

Partai berpengaruh, baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

c. Misi

1. Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

B. Platform Kebijakan Pembangunan

1. Prinsip Kebijakan

Secara umum, prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai partai da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah da'wah *rabbaniyah* yang *rahmatan lil'alamin*, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Da'wah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan umat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.

Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Da'wah juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.

1.1 Lengkap dan Integral (*Al-Syumuliyah*)

Sesuai dengan karakteristik da'wah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, memandangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

1.2 Reformatif (*Al-Ishlah*)

Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh partai selalu berorientasi pada perbaikan (*ishlah*), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

1.3 Konstitusional (*Al-Syar'iyah*)

Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (*hablun min al-nas*). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (*al-istimsak*) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan komprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibilitas sebagai ciri

dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian referensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisasikan amanah dan melawan kedhaliman.

1.4 Moderat (*Al-Wasathiyah*)

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (*ummatan wasatha*). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap, dan watak moderat (*wasathiyah*) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. *Al-wasathiyah* yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek teoritis (*nazhariyah*) dan operasional (*'amaliyah*) atau aspek pendidikan (*tarbiyah*) dan perundang-undangan (*tasyri'iyah*) harus merefleksikan pada aspek ideologi ataupun persepsi (*tashawwur*), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (*tatakrama*), *tasyri'* dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan.

1.5 Komitmen dan Konsisten (*Al-Istiqamah*)

Berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (QS. Az-Zukhruf: 43) merupakan ciri seorang muslim. Maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional partai harus istiqomah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kauniyat-Nya), dalam kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para *mujtahid* yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam risalah orisinal (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinuitas (*al-istimrar*) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

1.6 Tumbuh dan Berkembang (*Al-Numuw wa al-Tathawwur*)

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip *al-numuw wa al-tathawwur* (pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus

menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya, partai harus tetap konsentrasi kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

1.7 Bertahap, Seimbang dan Proporsional (*Al-Tadarruj wa Al-Tawazun*)

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah partai harus dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fitrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan seجات. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (*tadarruj dan tawazun*) harus melekat dalam seluruh kiprah partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukungnya ataupun kiprah kolektifnya.

1.8 Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan (*Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah*)

Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (QS. At-Taubah: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip *al-awlawiyat* dalam gerakan, pada hakikatnya merupakan refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip *al-awlawiyat* dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya *mashlahah ummah* menjadi dasar dan prinsip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsentrasi terhadap semua persoalan yang dihadapi umat. Kepentingan umat selalu menjadi pertimbangan dan prioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan umat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

1.9 Solusi (*Al Hulul*)

Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan aspek-aspek yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh umat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan baik (*ihsan*) dan profesional (*itqon*), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

1.10 Orientasi masa depan (*Al-Mustaqbaliyah*)

Pada kenyataannya, tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, dimana bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seharusnya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan, mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan,

program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak mengesampingkan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (QS. Al-Hasyr: 18).

1.11 Bagian dari da'wah sedunia (*Al-'Alamiyah*)

Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat mendunia (*'alamiyah*), sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi *sunnatudda'wah*. Dia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah 'alamiyah. Oleh sebab itu, prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat 'alami dan tunduk pada *sunnatudda'wah* tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.

2. Kebijakan Dasar

Kebijakan Dasar Partai, dapat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan Umum dan Strategi Umum. Kebijakan Umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, Politik, Birokrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan, Sosial Budaya,

IPTEK dan Hukum. Sementara itu, Strategi Umum ditempuh melalui dua hal yaitu Kebijakan Internal dan Eksternal .

A. Kebijakan Umum :

1. Ideologi

Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai.

1. Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi umat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
2. Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT; pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam; dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.
3. Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya di atas tiga prinsip
 1. Kemenyeluruhan dan finalitas sistem Islam
 2. Otoritas syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ijtihad
 3. Kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat

2. Politik

1. Pembangunan sistem. Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan
2. Pembangunan komunikasi politik. Komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan *guidance* para aktivis dalam komunikasi politik.
 1. Penyadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara.
 2. Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara partai dan masyarakat
3. Pembangunan budaya politik
 1. Mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaya dalam kehidupan politik
 2. Mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik
 3. Membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik
 4. Mengembangkan budaya hisbah.
4. Pembangunan partisipasi politik

1. Penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan Sejahtera secara sukarela
 2. Mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi secara bebas
5. Hubungan eksternal

Pola *ta'awun 'alal birri wat taqwa* (bekerja sama dalam merealisasikan kebajikan dan taqwa), dan tidak *ta'awun 'alal ismi wal 'udwan* (bekerja sama dalam dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu *Al-Wala* merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan *Al-Barra* merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir. Dalam rangka optimalisasi prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan umum.

1. Bersikap cinta, kerja sama (*ta'awun*), dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga Islam, baik di dalam ataupun di luar negeri
2. Aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama, ukhuwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam
3. Membudayakan sikap baik sangka (*husnuzhan*) terhadap sesama organisasi Islam

4. Bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan bendera kekufuran.

6. Pemilu 2004

Menghadapi Pemilu 2004 nanti diperkirakan skala persaingan antar partai politik semakin luas. Di sisi lain, diterapannya sistem semi distrik (berdasar Undang-undang Pemilu yang baru), seiring dengan menguatnya tuntutan desentralisasi, memerlukan kebijakan dan strategi baru. Dalam kaitan ini Partai Keadilan Sejahtera menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Mengikuti Pemilu tahun 2004 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera
2. Menentukan kawasan-kawasan unggulan untuk sukses dakwah melalui Pemilu yang rinciannya akan ditentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera
3. Komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam Pemilu dengan mencalonkan dari kalangan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU Pemilu
4. Mempercepat proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerah dan mengaktifkannya sebagai sarana rekrutmen tokoh potensial
5. Memperkuat struktur dan SDM di Dati II sebagai langkah antisipasi diberlakukannya otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik

6. Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu

3. Birokrasi

Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini yaitu, kebobrokan di semua sektor, sarang KKN, dan ketidakprofesionalan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan *clean government*. Sebagai konsekuensinya, partai perlu memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan *ishlah al-hukumah* dengan kebijakan:

1. Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir *taghyir* internal untuk menduduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah.
2. Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerintahan
3. Menjadi pelopor dalam pemberantasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat
4. Melakukan kontrol secara aktif.

4. Ekonomi dan Kesejahteraan

Kemandirian dalam memenuhi kedua *cost* dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis dan konkrit dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut.

1. Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam perilaku dan kebijakan ekonomi
2. Membangun kekuatan ekonomi umat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat
3. Memelihara kekayaan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industri dan proyek-proyek ekonomi Islam
4. Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh-musuh umat
5. Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak
6. Memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri

5. Sosial Budaya

Kecenderungan membiaknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemahaman keagamaan bagi sebagian besar masyarakat muslim telah menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam pemberantasannya, dapat menyerang lingkungan yang semula baik. Oleh sebab itu partai perlu mengantisipasi sedini mungkin setidaknya-tidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya berbagai penyimpangan tersebut dengan menetapkan kebijakan umum berikut:

1. Membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin
2. Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam bentuk kesenian
3. Aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan mengoreksi budaya yang merusak

6. IPTEK dan Industri

IPTEK dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya mungkin tercapai apabila manusia mampu memahami kehendak

Allah yang dimanifestasikan di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat mengenai hukum-hukum itu melalui aktivitas etis, aktivitas sosial dan teknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk itu perlu sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan industri untuk kebahagiaan manusia.

1. Penguasaan bidang IPTEK dan industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia
2. Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi IPTEK, sehingga menjadi rahmat bagi manusia
3. Mengembangkan IPTEK terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas SDM umat
4. Menumbuhkembangkan sentra-sentra industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi umat dan bangsa

7. Peran dan Tugas wanita

Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (*istikhlaf*) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan perempuan) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip 'kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidaknya-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itu, partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan wanita dalam politik.

1. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya
2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah
3. Keseimbangan hak pemberdayaan politik
4. Keseimbangan proporsioanal dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif
5. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer wanita yang berkembang di masyarakat
6. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik

8. Hukum

Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia, maka Partai Keadilan Sejahtera perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya supremasi hukum di dalam kehidupan masyarakat
2. Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam melalui cara-cara yang syar'i dan konstitusional

3. Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya
4. Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah, sebagai solusi, keteladanan dan rahmat bagi kehidupan.

9. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seharusnya ditangani secara serius dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya.

1. Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidikan integral yang menjamin lahirnya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan terampil
2. Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang berkedok aktivitas pendidikan
3. Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas

B. Strategi Umum :

Memperhatikan trend umum perubahan yang terjadi saat ini, diperlukan suatu kebijakan dasar untuk menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu diperlukan adanya strategi umum yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal :

1. Konsolidasi Internal

1. Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penataan perubahan:

1. Mengokohkan komitmen ideologis dan doktrin perjuangan
2. Mengembangkan keutuhan fikrah dan keluasan wawasan
3. Menguatkan ruh *mahabbah* (kecintaan), *ta'awun* (kerja sama) dan *ukhuwah* (persaudaraan) sesama kader
4. Mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung serta mengembangkan budaya amal-jama'i dengan ruh jundiyah

2. Konsolidasi internal dengan sasaran pengembangan syi'ar Islam, perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik:

1. Meningkatkan kesadaran tentang *wa'yu amni* dan *siyasi*
2. Meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsur-unsur kekuatan yang menjadi musuh Islam (yaitu

musuh secara ideologis, politis, ekonomis maupun sosial-budaya)
di kawasan tanggung-jawab da'wahnya

3. Mengembangkan kemampuan pertahanan diri pada setiap kader
4. Mengintensifkan *ta'amul ijtima'i* dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh setempat, termasuk aparat dan birokrasi pemerintahan dalam rangka menyerap informasi dan membangun dukungan sosial

3. Konsolidasi internal untuk menata perubahan:

1. Menumbuhkan kemampuan elemen struktur dan kader untuk memahami kondisi geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab da'wahnya
2. Meningkatkan penguasaan konsepsional dan metode-metode perubahan masyarakat serta pola-pola pengelolaannya
3. Meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisir agenda da'wah, dan melakukan perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjadikan DPC dan DPRa sebagai ujung tombak ekspansi da'wah di daerahnya

4. Konsolidasi internal tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan SDM:

Mengingat tantangan masa depan da'wah yang begitu kompleks, maka diperlukan adanya kelincahan gerak. Perlu segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk menentukan kebijakan dasar tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan SDM:

1. Melakukan reorganisasi partai yang disesuaikan dengan tantangan ke depan
2. Membangun pusat-pusat kaderisasi di setiap wilayah dan daerah
3. Mengalokasikan secara proporsional potensi SDM partai pada lembaga-lembaga strategis dan pusat-pusat perubahan
4. Menetapkan doktrin perjuangan dan prosedur disiplin organisasi bagi kader untuk mengokohkan militansi ideologis, pemikiran dan gerakan

2. Ekspansi Eksternal

1. Ekspansi eksternal melalui pengembangan syi'ar Islam dan pelayanan sosial:
 1. Memperluas wilayah-wilayah jangkauan da'wah secara geografis dan demografis
 2. Mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola
 3. Memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui berbagai media publikasi
2. Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis sosial:
 1. Menata personil da'wah dan lembaganya dan meningkatkan aktifitas pembinaan ke berbagai segmen strategis
 2. Mengembangkan lembaga pendidikan Islam

3. Meningkatkan kerjasama da'wah dengan berbagai lembaga, organisasi maupun tokoh-tokoh da'wah
3. Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum:
 1. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya media massa yang merusak
 2. Memberdayakan dan mengembangkan media massa internal
 3. Mengefektifkan program-program *munasharah* (kepedulian) dan informasi dunia Islam
 4. Menajamkan kegiatan-kegiatan nadawaat dan sejenis
4. Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik:
 1. Memperkuat dukungan sosial dan politik
 2. Optimalisasi peran dan publikasi misi kerja SDM yang ada di legislatif, eksekutif dan birokrasi
 3. Mendirikan LSM-LSM dan mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah
 4. Mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswa dan kalangan profesi dalam memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan
 5. Melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan
 6. Membangun jaringan lobby ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia

7. Mengefektifkan komunikasi dengan partai-partai Islam, partai-partai reformis, ormas-ormas Islam maupun tokoh masyarakat

C. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera Skala Nasional

1. Struktur Organisasi

Sejak awal pendirian Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002, partai ini telah berhasil melakukan pengembangan struktural partai secara vertikal dengan terbentuknya jaringan sebanyak 30 DPW, 366 DPD, dan 2475 DPC. Dalam Anggaran Dasar partai BAB IV Pasal 8 tentang Struktur Organisasi, di tingkat nasional/pusat struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut:

1. Majelis Syura
2. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
3. Majelis Pertimbangan Pusat
4. Dewan Pengurus Pusat
5. Dewan Syari'ah Pusat

Struktur pelaksana harian diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan skup nasional sampai tingkat kelurahan, yang meliputi:

1. DPP (Pengurus harian setingkat nasional)
2. DPW (Pengurus harian setingkat propinsi)
3. DPD (Pengurus harian setingkat kotamadya atau kabupaten)
4. DPC (Pengurus harian setingkat kecamatan)

5. DPRa (Pengurus harian setingkat kelurahan)

2. Keanggotaan

Dalam Anggaran Dasar BAB III Pasal 9 mengenai Keanggotaan disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai. Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga BAB III Pasal 5 mengenai Sistem dan Prosedur Keanggotaan disebutkan bahwa anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdiri dari:

1. Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian. Anggota Kader Pendukung terdiri dari:
 - a. Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai
 - b. Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu
2. Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penyeleksian. Anggota Kader Inti terdiri dari:

- a. Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua
 - b. Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut
 - c. Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi
 - d. Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli
4. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

D. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera dan Perkembangannya di Surakarta

a. Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Surakarta, tersusun sebagai berikut:

- i. Ketua Umum
- ii. Sekretaris Umum
- iii. Bendahara Umum

- iv. Ketua Bidang Pelajar dan Mahasiswa
- v. Ketua Bidang Kewanitaan
- vi. Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
- vii. Ketua Bidang Ekuitek
- viii. Ketua Politik, Hukum, dan Pemerintahan
- ix. Ketua Pembinaan Kader
- x. Ketua Badan Kehumasan
- xi. Ketua Pemenangan Pemilu

b. Anggota

Sebagai penerus perjuangan dari Partai Keadilan (PK), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus melakukan usaha-usaha perekrutan anggota, melanjutkan usaha-usaha yang telah dilakukan Partai Keadilan sebelumnya. Usaha-usaha perekrutan ini melalui berbagai kegiatan dan aktivitas rekrutmen yang dilaksanakan baik di tingkat DPD, DPC, maupun DPRa.

c. Sekretariat

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No. 465 B Griyan, Pajang, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah.

E. Logo Partai Keadilan Sejahtera



1. Arti Lambang Partai

Bentuk lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan dan keserasian.
2. Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka'bah.
3. Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah.
4. Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqomah, berani dan ketegasan yang mewujudkan keajahteraan.

Warna lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Putih berarti bersih dan kesucian.
2. Hitam berarti aspiratif dan kepastian.
3. Kuning emas berarti kecermelangan, kegembiraan dan kejayaan.

2. Makna Lambang Partai

Makna lambang partai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan ummat dan bangsa.

BAB III

SAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Pola Komunikasi Internal Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sebelum masuk kepada permasalahan konsep pola komunikasi menurut pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ada hal yang cukup penting untuk kita ketahui, yaitu tentang pola komunikasi yang selama ini dibangun di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut beberapa pendapat kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pola komunikasi di PKS adalah adanya hubungan timbal balik antar personal, dimana ada personal yang menyampaikan pesan, dan berharap personal penerima pesan akan menanggapi dan merespon pesan tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam hal ini memiliki pola komunikasi dimana antara satu individu yang satu dengan individu yang lain saling berkaitan secara aktif. Anggota/kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pola timbal balik (*feedback*) dalam berinteraksi, sehingga mereka mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi. Dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengacu pada pola hubungan dua arah. Dalam beberapa pola komunikasi internal, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sistem timbal balik antar anggota. Keputusan diambil berdasarkan interaksi yang dilakukan. Berdasarkan pembahasan internal yang akhirnya membawa pada sebuah kebijakan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengedepankan keaktifan peran personal. Dalam pola komunikasi yang

lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memiliki alur yang melibatkan dua belah pihak. Semuanya mengedepankan peran penting keaktifan personal secara kualitas maupun kuantitas.

Menurut Fa. Izzaturrahman, ST., MT., Ketua Bidang Pembinaan Kader (BPK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surakarta, pola komunikasi yang dibangun di internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada 2. Yaitu, pola komunikasi struktural/formal, dan pola komunikasi kultural.

“Sampai kita berbentuk partai seperti ini, komunikasi kita ada dua, yaitu komunikasi formal/struktur dan komunikasi kultural.” (Wawancara, 4, 3/5/2009).

Dari komunikasi struktural dan kultural yang dibangun tersebut, komunikasi kultural masih lebih kuat berpengaruh di internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pola komunikasi kultural ini lebih kuat dan intensif, karena di dalam pengelolaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), semua kadernya wajib mengikuti pembinaan yang diadakan rutin per pekan. Dalam forum pembinaan tersebut atau yang biasa disebut Taklim Rutin Kader (TRK), ada guru/pembina dan ada murid/yang dibina. Taklim Rutin inilah yang mengikat kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena ini dianggap sebagai sarana pemantauan dan komunikasi yang cukup efektif.

Taklim Rutin Kader (TRK) ini, terus digunakan sampai sekarang, karena selain berfungsi sebagai penjagaan kader, juga berfungsi sebagai media pemantauan kader dan juga media/wahana keberjalanan komunikasi. Dari Taklim Rutin Kader (TRK) ini juga, struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surakarta akan bisa memantau kondisi kader-kadernya dan juga memantau pola komunikasi di internal kader.

Karena itulah, Taklim Rutin Kader (TRK) adalah sebagai sarana aktualisasi kader dalam tiap pekannya, dimana di dalam TRK tersebut, kader akan dibina menjadi kader-kader dakwah yang siap menjadi pilar-pilar keberjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang *nota bene* disebut sebagai partai dakwah.

Menurut pemaparan Fa. Izzaturrahman, ST., MT., komunikasi 2 cara yang digunakan oleh internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta ini, cukup efektif. Hal-hal yang bersifat struktural, bisa langsung dilewatkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) kemudian ke Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Ranting (DPRa), dan akhirnya sampai ke kader. Sedangkan hal-hal yang sifatnya adalah pengerahan kader dalam sebuah acara partai atau dalam konteks optimalisasi massa, maka langsung lewat jalur pembinaan per pekan. Hal tersebut akan menjadi lebih efektif, karena adanya ikatan yang kuat antar kader.

Kunci dari adanya ikatan kuat internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut salah satu pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Surakarta, Endang Widiastuti adalah adanya keterbukaan antara kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pola komunikasi melalui jalur kultural ini menggunakan pola *top down*. Dari struktur akan menghubungi para guru atau pembina, untuk

menyampaikan informasi, hasil keputusan, atau kebijakan. Baru kemudian, guru atau pembina ini menyampaikan kepada para kader yang dibinanya. Jalur kultural ini sangat mendukung jalur struktural yang lebih formal.

Di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada sebuah hubungan timbal balik antara struktur dengan kader, maupun antara kader dengan kader. Struktur yang dimaksud adalah jajaran pengurus partai, dari tingkat DPP (Dewan Pengurus Pusat) hingga DPRa (Dewan Pengurus Ranting). Sedangkan kader adalah orang-orang yang terekrut dan terbina secara intens oleh partai.

Komunikasi yang dibangun tidak hanya *top down* (dari atas ke bawah), tapi juga *bottom up* (dari bawah ke atas). Pola komunikasi internal yang dibangun, tidak selalu melalui internalisasi pengurus (struktur) baru kemudian disampaikan ke tataran kader. Dari sinilah kader akan bisa memberikan respon. Bisa dengan menyampaikan *feed back* (tanggapan balik) ke struktur, atau hanya tanggapan-tanggapan lainnya yang bersifat kesiapan penerimaan terhadap informasi yang disampaikan oleh struktur. Namun, dibangun juga sebuah pola komunikasi internal yang diawali oleh kader, baru kemudian disampaikan ke struktur (pengurus). Jadi, bisa dikatakan ada hubungan komunikasi aktif di internal kader PKS, baik antara kader dengan struktur partai, maupun antara kader dengan kader.

“Komunikasi tidak hanya dari struktur PKS, baru kemudian ke kader, tapi juga dari kader ke struktur. Jadi, tidak harus menunggu instruksi dari struktur, tapi kader juga bisa menyampaikan terlebih dahulu kepada struktur” (Wawancara, 3, 17/4/2009)

Kemampuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melahirkan massa dan pendukung yang solid tentunya tidak lepas dari adanya pola

komunikasi yang diterapkan para anggotanya. Sebagai partai kader berbasis massa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki perhatian yang cukup besar terhadap para anggotanya. Salah satunya adalah perhatian terhadap pola komunikasi internal anggota yang dianggap sebagai salah satu kunci penjagaan soliditas internal partai.

Namun ada juga kader yang beranggapan bahwa komunikasi itu hanya dijalankan oleh struktur dan kader hanya menunggu dan menjalankan keputusan. Kader/anggota partai yang cenderung hanya mau menunggu atau menerima saja, biasanya menganggap bahwa pola komunikasi itu hanya dijalankan oleh orang yang punya posisi saja. Sedangkan kader/anggota hanya sebatas taat dan *tsiqoh* (percaya). Jadi ada beberapa kader yang cenderung pasif, meskipun mereka memahami adanya konsep komunikasi *bottom up*.

B. Format Pola Komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Format-format pola komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta, pada intinya memiliki kesamaan dengan pola komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Format pola komunikasi PKS pada umumnya memiliki beberapa perangkat. Pada hakekatnya, perangkat-perangkat tersebut berorientasi pada pembentukan hubungan yang sehat antara kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sehingga setiap pesan yang ingin tersampaikan, bisa diterima dengan tepat oleh pihak penerima pesan.

Adapun perangkat-perangkat yang merupakan format dari pelaksanaan pola komunikasi internal, khususnya yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta terdiri dari *syura* (rapat), bayanat (penjelasan) dan jarkom (jaringan komunikasi). Uraian berikut ini akan mencoba menjelaskan konsep dan implementasi dari format-format pola komunikasi tersebut.

1. Syura (rapat)

Untuk mengupas lebih dalam tentang *syura* (rapat), maka pada bagian ini akan disajikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Definisi *syura*

b Manfaat *syura*

Berikut ini adalah uraian dari beberapa poin di atas untuk mengupas konsep *syura*.

a. Definisi syura (rapat)

Syura atau musyawarah merupakan derivasi (kata turunan) dari kata kerja '*syawara*'. Dan kata '*syawara*' mempunyai beberapa makna, antara lain memeras madu dari sarang lebah; memelihara tubuh binatang ternak saat membelinya; menampilkan diri dalam perang. Dan makna yang dominan adalah meminta pendapat dan mencari kebenaran.

Secara bahasa, *syura* berarti mengambil, melatih, menyodorkan diri, dan meminta pendapat atau nasihat; atau secara umum, *asy-syûrâ* artinya meminta sesuatu.

Sedangkan secara istilah (terminologis), syura bermakna:

- a. Memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat (*Nizhamul-Hukmi Fil-Islam*, Dr. 'Arif Khalil, hal. 236)
- b. Mengeluarkan pendapat (mencari pemecahan) dari orang yang memiliki pengetahuan/pengalaman tentang masalah tersebut.
- c. Memahami permasalahan melalui pengujian dari berbagai aspek/sudut pandang dengan melalui pertolongan orang lain.
- d. Berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya (Ibn al-Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, 1/298).
- e. Mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati (*Rûh al-Ma'âni*, 25/46).
- f. Berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar, dengan mengungkapkan berbagai pendapat dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk guna mengambil keputusan (Al-Khalidi, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm*, cet. II, hlm. 142)

Rasulullah saw. menjadikan berjalannya syura sebagai indikator kepemimpinan yang baik. Beliau bersabda, “Jika para pemimpin kalian adalah orang-orang terbaik, orang-orang kayanya merupakan orang-orang yang paling dermawan, dan urusan kalian dimusyawarahkan di antara

kalian, maka permukaan bumi lebih baik bagi kalian dari pada perut bumi. Dan jika para pemimpin kalian adalah orang-orang paling buruk, orang-orang kaya merupakan orang-orang paling kikir, dan urusan kalian diserahkan kepada perempuan-perempuan kalian, maka perut bumi lebih baik bagi kalian ketimbang permukaannya.” (HR. At-Tirmidzi)

Apa yang diucapkan Rasulullah saw. itu tidak lain mempertegas perintah Allah swt. Firman-Nya, “Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-syura: 36)

b. Manfaat syura (rapat)

1. Lebih mendekati kebenaran
2. Menggali ide-ide cemerlang
3. Terhindar dari kesalahan
4. Terjaga dari celaan
5. Selamat dari penyesalan
6. Persatuan diantara hati
7. Mengikuti atsar salafus-shalih

Secara teori, di dalam sebuah organisasi, ditemukan adanya kelompok-kelompok kecil. Salah satu sistem yang dipakai dalam kelompok-kelompok kecil adalah rapat. Berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan

bahwa kebanyakan organisasi memang menggunakan kelompok-kelompok kecil dalam pekerjaan sehari-harinya. (Arni Muhammad, 2001:181).

Menurut Tillman, kelompok adalah bagian integral dari semua organisasi. Rata-rata anggota pimpinan tingkat menengah dan atas, menghabiskan seperempat atau sepertiga dari waktu kerja mereka sehari-hari untuk berdiskusi/rapat. Ini tidak termasuk aktivitas sosial dan aktivitas lainnya dalam masyarakat. Rata-rata dari pimpinan tingkat atas menghabiskan 60 % dari waktunya dengan berkomunikasi dan mayoritas kegiatan ini adalah berdiskusi/rapat. (Arni Muhammad, 2001:182)

Diskusi/rapat-apat kelompok kecil dalam berbagai bentuk memang terlihat lazim dalam semua aspek masyarakat dan khususnya organisasi, karena diskusi/rapat dapat berfungsi untuk mempelajari komunikasi kelompok tersebut.

Menurut Shaw (1976) ada enam cara untuk mengidentifikasi suatu kelompok, yang dari identifikasi tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain dan berkomunikasi tatap muka. Jika salah satu dari komponen ini hilang, maka individu yang terlibat tidaklah berkomunikasi dalam kelompok kecil.

Komunikasi kelompok kecil dapat digunakan untuk bermacam-macam tugas atau untuk memecahkan masalah. Tetapi dari semua tujuan itu,

dapat dikategorikan atas dua kategori yaitu untuk tujuan personal dan tujuan yang berhubungan dengan tugas. (Arni Muhammad, 2001:182)

Terkait tujuan personal, kelompok kecil dalam hal ini rapat mencakup hubungan sosial, penyaluran, kelompok terapi dan belajar. Sedangkan komunikasi kelompok kecil yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan mencakup dua tugas umum, yaitu pembuatan keputusan dan pemecahan masalah.

Dalam hal ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dikatakan telah menerapkan pola dan sistem yang tepat sesuai dengan teori. Secara teori, rapat adalah salah satu pola komunikasi dalam sebuah organisasi atau kelompok. PKS pun menggunakan rapat sebagai pola komunikasi dalam organisasi atau kelompoknya. Dalam keorganisasian Partai Keadilan Sejahtera (PKS), rapat disebut sebagai musyawarah atau *syura*. *Syura* yang dianggap sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sesuai dengan teori rapat dalam kelompok kecil yang merupakan sarana untuk memecahkan masalah dan melaksanakan bermacam-macam tugas.

Secara personal, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga berfungsi untuk mengetahui hubungan sosial internal kader/anggota dan penyaluran aspirasi. Sedangkan dalam hal pengerjaan tugas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menggunakan rapat sebagai forum pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

Disebutkan oleh salah seorang narasumber yang merupakan kader PKS Surakarta, bahwa rapat adalah pola komunikasi yang digunakan oleh PKS untuk membahas atau menyelesaikan suatu permasalahan. Rapat biasa dilaksanakan dalam berbagai pembahasan. Dengan anggota rapat yang berbeda-beda, sesuai dengan konten pembahasan.

”Ada rapat, rapat itu biasanya diawali dengan undangan, kemudian dalam rapat itu ada beberapa rencana agenda, baru kita nanti ikut dalam pembahasan tersebut.” (Wawancara, 3, 17/4/2009)

Rapat (syura) adalah sarana partai untuk mengetahui kondisi kader atau kondisi struktur di bawahnya. Anggota dari rapat biasanya terdiri dari orang-orang yang berkaitan langsung dengan konten pembahasan rapat. Misal rapat bidang kaderisasi, maka yang dihadirkan adalah ketua-ketua bidang kaderisasi. Melalui rapat partai, PKS bisa menyelesaikan permasalahan dan bisa memutuskan kebijakan untuk diturunkan kepada kader-kader di bawahnya.

2. Bayanat (keterangan)

Bayanat adalah keterangan. Bayanat ini biasanya diberikan dari struktur kepada kader di bawahnya, berupa penjelasan tertulis dan bisa diakses oleh semua kader. Bayanat diturunkan kalau ada permasalahan kepartaian atau kebijakan kepartaian dan harus segera diwacanakan serta disampaikan ke kader-kader di bawahnya secara keseluruhan. Bayanat juga bisa dikonsumsi oleh siapa saja jika ada kemauan untuk mengakses informasi bayanat tersebut.

Bayanat (keterangan) bisa mencakup banyak hal. Kaitannya dengan kepartaian, bayanat berisi tentang sebuah kebijakan yang diambil di dalam *syura* (rapat) dan harus disosialisasikan ke kader, karena menyangkut eksistensi partai. Sedangkan kaitannya dengan kekaderan, bayanat biasanya berisi seruan kepada kader.

Tujuan dari bayanat (keterangan) ini adalah untuk memberikan kefahaman kepada kader. Selain itu juga untuk menjelaskan mengapa sebuah kebijakan diambil oleh struktur. Bayanat juga memberikan pewacanaan kepada kader tentang adanya sebuah permasalahan yang sedang ditangani oleh struktur.

Pada dasarnya, bayanat adalah derivasi dari *syura* (rapat) yang dilaksanakan internal struktur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan merupakan pola penyampaian hasil *syura* (rapat) yang dilaksanakan. Jadi, sebenarnya bayanat bukanlah sebuah format pola komunikasi, karena bayanat tidak memiliki fungsi dan esensi sebagaimana yang terkandung dalam pola komunikasi yang seharusnya.

Namun, bayanat menjadi sangat penting dan urgen, karena ini adalah salah satu format penyampaian yang berarti juga masuk sebagai pola komunikasi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam hal ini, PKS mengambil dasar atau landasan dari Al-Qur'an Surat Al-Ankabut ayat, yang memiliki arti "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar

kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Dari landasan itulah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa harus menurunkan sebuah bayanat setiap kali ada hasil *syura* (rapat) struktur yang merasa harus tersampaikan ke kader. Beberapa contoh bayanat adalah: Bayanat Nomor : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430 Tentang PILPRES 2009; Bayanat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah terkait Pemberitaan Media Massa Tentang Status Hukum Sukawai Sutarib; Bayan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Seputar Isu Partai Terbuka dan Caleg Non Muslim; Bayan Dewan Syariah Pusat DPP PKS (PKS menjawab fitnah).

Jadi, secara teori, bayanat (keterangan) bukan termasuk dari pola komunikasi suatu organisasi atau kelompok kecil, karena memang tidak memenuhi kriteria sebuah pola komunikasi. Namun, di internal kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bayanat merupakan pola komunikasi yang harus ditaati juga sebagai jembatan antara struktur kepartaian dengan kader/anggota-anggota di bawahnya.

Kalaupun tidak dijalankan dengan bayanat, informasi yang harus disampaikan masih akan terus bisa berjalan, namun menurut PKS, bayanat adalah sebuah jalan yang sesuai dengan landasan syar’i partai.

Bayanat (keterangan) ini secara aplikatif terkadang akan menciptakan efek pola komunikasi baru di internal Partai Keadilan Sejahtera, yang hingga sekarang masih membudaya. Di internal Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) budaya ini disebut dengan budaya *tabayyun* (klarifikasi). Menurut Fa. Izzaturrahman, ST., MT., PKS memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan budaya untuk meminta penjelasan atas kebenaran berita yang beredar, dan tidak sekedar menyampaikan tanpa dasar yang benar. Meskipun –masih menurut Fa. Izzaturrahman, ST., MT.,- terkadang ada satu hingga atau dua kader yang mengesampingkan budaya *tabayyun* (klarifikasi) hingga berita yang tersebar atau kebijakan yang seharusnya difahami, justru menjadi sebuah gossip yang berkembang.

“kalau dibandingkan dengan masyarakat umum, PKS memang lebih terbiasa dengan budaya *tabayyun*. Tapi memang ada, satu dua kader yang tanpa konfirmasi, menyebarkan berita hingga menjadi gossip” (wawancara 4, 3/5/2009)

Ada juga yang menganggap bahwa *tabayyun* (klarifikasi) merupakan budaya yang menunjukkan adanya kesadaran kader, bahwa keberadaan mereka adalah dalam rangka belajar.

“PKS memiliki budaya sangat kuat, yaitu menghindari prasangka. Dan *tabayyun* adalah sebuah bentuk budaya yang dilandasi kesadaran bahwa kita sedang belajar bersama untuk menuju pribadi yang lebih baik. Makanya, untuk setiap kesalahan atau berita yang beredar, sebisa mungkin di *tabayyun*-kan terlebih dahulu.” (wawancara 2, 16/4/2009)

Budaya *tabayyun* (klarifikasi) inilah yang menunjukkan salah satu perbedaan yang terlihat antara pola komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan pola komunikasi di luar Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Budaya ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahfahaman dan juga untuk meminimalisir konflik di internal kader/anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Jadi, meskipun tidak memenuhi kaidah pola komunikasi, tapi bayanat (penjelasan) menjadi sesuatu yang penting di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

3. Jaringan Komunikasi (Jarkom)

Menurut beberapa kader/anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD), PKS juga memiliki pola komunikasi yang biasa disebut dengan jaringan komunikasi (jarkom). Jarkom yang berjalan dan dibangun di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, biasanya dijalankan melalui *short message service* (sms).

Jaringan komunikasi (jarkom) digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendesak dan harus tersampaikan ke kader dalam rentang waktu yang relatif cepat. Sesuatu yang seharusnya difahami oleh kader, dan ternyata tidak memungkinkan untuk menghadirkan kader/anggota dalam waktu cepat, biasanya disiasati dengan mengirim pesan tertulis melalui *sms*. *Sms* ini akan disampaikan berantai ke jalur-jalur di bawahnya. Dan kondisi atau tradisi seperti ini, di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut sebagai jaringan komunikasi (jarkom).

Dijelaskan secara teori, bahwa dalam setting kelompok, jaringan menyatukan struktur kelompok dengan memfokuskan saluran yang dipakai oleh individu ketika mereka secara langsung berkomunikasi dengan individu lainnya. Satu variabel utama dari struktur jaringan adalah pemusatan jaringan tersebut yang menunjukkan secara jelas satu atau dua

posisi dalam struktur tersebut, yang lebih sentral daripada yang lain. Sudah dengan sendirinya, tiap posisi diduduki oleh seseorang dalam peran komunikatifnya sebagai sumber/penerima. (B. Aubrey Fisher, 1990:183)

Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan struktur antara satu individu dengan individu lainnya dalam kelompok. Hubungan ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi individu dengan arus informasi dalam jaringan komunikasi.

Secara umum, jaringan komunikasi ini dibedakan atas jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi formal salurannya ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan, yang tidak bisa dipungkiri oleh organisasi/kelompok. Sedangkan jaringan komunikasi informal adalah tidaklah direncanakan dan biasanya tidaklah mengikuti struktur formal organisasi, tetapi timbul dari interaksi sosial yang wajar diantara anggota organisasi.

Dalam kaitannya dengan teori, dapat dilihat bahwa jaringan komunikasi yang dipakai di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ternyata hanya sebatas penggunaan saluran informasi saja. Tidak ada komponen-komponen yang seharusnya mendukung adanya atau berlakunya sebuah jaringan komunikasi (jarkom). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya memakai istilah jaringan komunikasi (jarkom) untuk mempermudah berlakunya sebuah saluran informasi ke bawah. Saluran komunikasi dalam struktur organisasi menghubungkan individu-individu dalam tiap tingkat hierarki maupun bertindak menghubungkan

tingkat hierarki dari yang satu dengan yang lainnya. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki kelompok-kelompok kecil, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentukan kapabilitas, untuk menentukan sambungan saluran tertentu antara individu ataupun posisi sebagai saluran yang seharusnya dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan pembangunan/penyampaian saluran-saluran tersebut dijalankan dengan melalui *sms*.

Dari hasil analisa tersebut, dapat diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta, tidak menggunakan jaringan komunikasi sebagaimana mestinya, tetapi hanya memakai istilah jaringan komunikasi (jarkom) untuk menyampaikan saluran informasi kepada saluran-saluran di bawahnya. Dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkategorikan jarkom sebagai salah satu pola komunikasi internal partai mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Penny Oktaviani,

“Kalau dari struktur ada bayanat, yang bisa dikonsumsi tidak hanya oleh kader, asalkan mau mengakses. Ada jarkom yang biasanya disampaikan lewat sms, atau forum-forum koordinasi internal kader” (wawancara 2, 16/4/2009)

Jaringan komunikasi (jarkom) yang ada di internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu bentuk pola komunikasi internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun secara teori sangat jauh dari jaringan komunikasi yang seharusnya dilaksanakan. Komponen-komponen yang ada di dalam jaringan komunikasi sama sekali tidak

terpenuhi di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta.

C. Realisasi Pola Komunikasi PKS Kota Surakarta

Pada dasarnya, pola komunikasi yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta telah ada bersamaan dengan lahirnya partai ini pada tahun 1998, yang kala itu bernama Partai Keadilan (PK). Artinya, pola komunikasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan suatu hal yang baru yang ada di partai ini. Pola komunikasi yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan tindak lanjut dari pola komunikasi yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan (PK). Karena itu, tidak ada suatu hal yang membedakan antara pola komunikasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan (PK), kecuali dari sisi pengembangannya saja. Hal ini adalah sesuatu hal yang wajar mengingat berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan suatu langkah dalam rangka menuju pemilu 2004 sebagai kontestan. Jadi perubahan Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak berarti adanya perubahan “warna” mendasar dari Partai Keadilan (PK).

Ketika tidak ada perbedaan mendasar dari pola komunikasi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan pola komunikasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan (PK), maka pola yang digunakan dalam komunikasipun masih menggunakan pola yang sama. Hal ini bisa dilihat dari

pola komunikasi melalui program pembinaan yang ada di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang biasa disebut dengan Taklim Rutin Kader (TRK). Dan pola komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang cukup berpengaruh ke kader adalah pembinaan melalui Taklim Rutin Kader (TRK) tersebut.

Disampaikan oleh Fa. Izzaturrahman, ST., MT., semua informasi kepartaian dan kekaderan akan disampaikan atau dikomunikasikan ke kader dengan jalan struktural dan kultural. Menurutnya, cara ini sangat efektif karena informasi bisa tersampaikan dengan tepat.

“komunikasi ini sangat efektif. Karena hal-hal yang bersifat struktural, kita akan lewat DPD, DPC, DPRa. Sedangkan ketika kita membutuhkan pengerahan kader secara maksimal, maka kita cenderung menggunakan jalur-jalur kultural. Kita akan menghubungi pembina/guru-guru untuk menyampaikan kepada yang dibina, terkait informasi-informasi atau penyikapan-penyikapan terhadap sesuatu.” (wawancara 4, 3/5/2009)

Di sisi lain, ada kader yang mengungkapkan bahwa pola komunikasi yang dijalankan oleh struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta, ada beberapa kendala. Semisal, sebuah *bayanat* (penjelasan). Meskipun *bayanat* itu dianggap sebagai pola komunikasi yang cukup efektif, namun terkadang realisasi penyampaiannya ke bawah sering terkendala masalah teknis. Hal ini terjadi karena orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan ke bawah, terkadang tidak melaksanakan tugasnya secara optimal, karena kendala waktu atau kesibukan personal.

Guru atau pembina yang diharapkan menjadi ujung informasi, tetapi karena tidak datang koordinasi rutin, maka informasi yang seharusnya cepat tersampaikan, akhirnya terhambat, karena ada rantai informasi yang terputus.

Selain itu, ada beberapa permasalahan teknis yang juga terjadi terkait pola komunikasi tersebut. Bisa disebabkan oleh faktor personal atau memang jalur yang keberjalanannya agak lambat.

Beberapa permasalahan yang muncul tersebut, bisa menyebabkan terjadinya konflik di internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meskipun kadarnya sangat kecil. Kecilnya tingkat konflik tersebut, karena adanya pola pembinaan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dari pembinaan tersebut, kader dipahamkan tentang adanya ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam. Selain itu kader juga dibina dan dibentuk untuk menjadi personal yang memiliki karakter-karakter kepribadian Islam. Dari situlah, konflik yang terjadi di internal kader, bisa diatasi karena masing-masing kader sudah memiliki kefahaman tentang hidup berjamaah atau berorganisasi.

Karakter-karakter muslim yang ideal adalah :

1. Benar akidahnya (*salimul akidah*)
2. Benar ibadahnya (*shahihul ibadah*)
3. Kokoh akhlaknya (*matinul khuluq*)
4. Berwawasan luas (*mutsaqaful fikr*)
5. Kuat fisiknya (*qawiyyul jism*)
6. Mandiri kehidupannya/bisa mencari nafkah (*qadirul 'alal kasbi*)
7. Bermanfaat bagi orang lain (*nafi 'ul lighairihi*)

8. Bijaksana dalam memelihara waktunya (*harishun 'ala waqtihi*)
9. Bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu (*mujahidun linafsihi*)
10. Memperbaiki penampilan (*munazhzhom fi syu'unih*)

Selain karakteristik-karakteristik di atas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga membuat parameter/standarisasi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau yang biasa disebut dengan Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam buku Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera 2009 yang disusun oleh Tim Kaderisasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dipaparkan secara jelas tentang kapasitas internal dan eksternal yang idealnya dimiliki oleh setiap kader Partai Keadilan Sejahtera.

1. Kokoh dan Mandiri
2. Dinamis dan Kreatif
3. Spesialis dan Berwawasan Global
4. Murabbi Produktif
5. Beramal Jama'i
6. Pelopor Perubahan
7. Ketokohan Sosial

Dari karakteristik dan kapasitas kader internal dan eksternal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, diharapkan akan terbentuk kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki komitmen dan integritas diri yang tinggi, sehingga tidak mudah terpecah oleh konflik ataupun pengaruh-pengaruh eksternal.

D. Relevansi dengan Teori

Suatu tindakan ilmiah akan senantiasa mendasarkannya pada teori yang berfungsi sebagai pegangan ataupun pengendali dari tindakan yang dilakukan. Hal ini bertujuan supaya tindakan yang dilakukan akan memiliki arah, tujuan, dan sistematika yang jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bagian ini penulis akan mencoba mengemukakan relevansi antara pola komunikasi di lihat dari sisi konsep dan teori dengan pola komunikasi yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta. Uraian pada bagian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah pola komunikasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta mempunyai dasar dan kesesuaian dengan teori mendasar dari pola komunikasi.

Setidaknya ada beberapa poin acuan untuk mengukur tingkat relevansi antara konsep dan pelaksanaan pola komunikasi. Poin-poin tersebut adalah :

- a. Merujuk kepada hasil wawancara dengan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan kader, bahwa pola komunikasi di PKS adalah adanya hubungan timbal balik antar personal, dimana ada personal yang menyampaikan pesan, dan berharap personal penerima pesan akan menanggapi dan merespon pesan tersebut.

Merujuk kepada kaidah tersebut, penulis dapat melihat bahwa format-format pola komunikasi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta mempunyai arahan

terhadap penumbuhan kesadaran akan pesan yang disampaikan, dan adanya partisipasi atau reaksi timbal balik antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Contoh konkrit yang bisa dilihat adalah adanya konsep *bottom up* dan *top down* yang diberlakukan di internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta. Walaupun sebagian besar, kader non pengurus hanya banyak menerima pesan dari struktur, namun harapannya adalah selalu ada *feed back* dari kader (sebagai penerima pesan) kepada struktur (sebagai pemberi pesan).

Pola komunikasi di internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta terbagi terbagi menjadi 2 (sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengurus) yaitu pola komunikasi struktural (formal) dan pola komunikasi kultural. Menurut analisa penulis, pola komunikasi struktural (formal) menunjukkan adanya keprofesionalan sebuah organisasi, dimana pola komunikasi dilaksanakan berdasarkan dan sesuai jalur yang ada, yaitu dari tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) hingga Dewan Pengurus Ranting (DPRa). Di satu sisi, adanya pola komunikasi kultural, menunjukkan adanya ikatan antara kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan organisasi dan struktur yang ada.

Komunikasi seringkali dilaksanakan sekaligus menggunakan 2 cara tersebut. Dalam hal-hal yang kaitannya dengan keorganisasian, maka PKS menggunakan jalur struktural (formal). Namun untuk hal-hal yang bersifat ke-kader-an, maka PKS menggunakan jalur kultural. Hal tersebutlah yang

bisa jadi menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki basis massa yang kuat dengan pola komunikasi yang cukup efektif.

Terkait format-format pola komunikasi yang dipakai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ada beberapa yang sesuai kaidah teori yaitu rapat (yang di internal PKS disebut dengan *syura*). Sedangkan ada dua format pola komunikasi yang tidak sesuai dengan teori, yaitu bayanat dan jaringan komunikasi (jarkom). Bayanat hanyalah sebuah pola yang dipakai di internal PKS untuk menjelaskan kebijakan atau hasil-hasil *syura* struktur. Sedangkan jaringan komunikasi adalah sebuah pemakaian istilah internal yang maksudnya adalah adanya saluran informasi yang dipakai untuk menyampaikan informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan kekaderan.

- b. Merujuk kepada konsep pola komunikasi yang termuat pada bagian telaah pustaka di bab 1, yang menyiratkan bahwa pola komunikasi adalah suatu proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal. Komunikasi harus meliputi paling sedikit tiga komponen. Komponen pertama adalah komunikator, yakni orang yang menyampaikan isi komunikasi tersebut. Komponen kedua adalah komunikan, orang yang menerima isi komunikasi tersebut. Komponen ketiga adalah isi komunikasi sendiri yang biasa disebut 'pesan' sebagai terjemahan dari '*message*'. Kalau ada salah satu dari tiga komponen itu tidak ada, maka komunikasipun tidak ada. Pesan komunikasi harus sama-sama dimengerti oleh komunikator dan komunikan. Kalau seorang tidak mengerti perihal yang dikatakan orang

lain kepadanya, komunikasi tidak terjadi. Dalam hubungan ini ada dua hal yang harus dimengerti oleh komunikan. Pertama adalah bahasa yang digunakan, dan kedua adalah isi maksud yang dimaksud –yang dikomunikasikan dengan bahasa tersebut-. Mungkin saja bahasanya dimengerti, tetapi belum tentu isi maksudnya.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah pola yang dilakukan secara intensif. Ini terbukti dengan adanya konsep komunikasi timbal balik antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Selain itu di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menggunakan 2 pola komunikasi, yaitu pola komunikasi struktural (formal) dan pola komunikasi kultural. Hal tersebut bisa menunjukkan adanya pola yang intensif, karena dengan struktural (formal) maka bisa memberikan pembelajaran politik yang profesional kepada kader, sedangkan dengan pola komunikasi kultural, maka bisa secara langsung menyentuh ke kader sehingga kader bisa langsung memberikan *feed back* (tanggapan balik).

Selain itu, dengan adanya pola komunikasi 2 cara tersebut, maka kader dikondisikan untuk menjadi partisan. Perjuangan politik harus dilakukan dalam sebuah tatanan yang teratur, perlu soliditas dan loyalitas di dalamnya. Tanpa itu, maka perjuangan tidak akan terarah, tidak akan mempunyai kekuatan dan produktifitas yang baik.

Jadi terkait relevansi dengan teori, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang menerapkan model komunikasi interaksional sebagaimana yang

dijelaskan di telaah pustaka Bab 1. Namun, secara teori, ada beberapa format pola komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum tepat sesuai dengan teori.

Dapat disimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Surakarta telah melaksanakan pola komunikasi internal yang efektif, meskipun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan teori.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai baru dalam perpolitikan Indonesia, yang dianggap memiliki kemampuan melahirkan massa dan pendukung yang solid, tentunya tidak lepas dari adanya faktor-faktor rekrutmen (kaderisasi) dan juga pola komunikasi yang diterapkan para anggotanya. Sebagai partai kader berbasis massa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki perhatian yang cukup besar terhadap para anggotanya. Salah satunya adalah perhatian terhadap pola komunikasi internal anggota yang dianggap sebagai salah satu kunci penjagaan soliditas internal partai.

Komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial. Apabila orang telah mengadakan hubungan tetap, maka sistem komunikasi yang mereka lakukan akan menentukan apakah sistem tersebut dapat mempererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan atau melenyapkan persengketaan apabila muncul.

Pola komunikasi dalam pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah adanya hubungan timbal balik antar personal, dimana ada personal yang menyampaikan pesan, dan berharap personal penerima pesan akan menanggapi dan merespon pesan tersebut. Dalam hal pola komunikasi ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki hubungan dimana individu yang satu dengan individu yang lain saling berkaitan aktif. Adanya komunikasi dua

arah antar kader, menuntut keaktifan pola keaktifan timbal balik. Ada penyampai pesan yang menyampaikan pesan-pesan kepada anggota/kader lain.

Pembahasan tentang temuan-temuan penelitian menghasilkan beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu :

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pola komunikasi yang selama ini membudaya, yaitu pola komunikasi struktural dan pola komunikasi kultural. Komunikasi struktural merupakan komunikasi yang dibangun berdasarkan struktur kepartaian yang ada, yaitu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pengurus Ranting (DPRa). Sedangkan komunikasi kultural yang dimaksud adalah komunikasi yang dibangun diinternal kader, berdasarkan aktifitas rutin kader yang diadakan per pekan, yang biasa Taklim Rutin Kader (TRK).

Dari komunikasi struktural dan kultural yang dibangun tersebut, komunikasi kultural masih lebih kuat berpengaruh di internal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena di dalam pengelolaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semua kadernya wajib mengikuti pembinaan yang diadakan rutin per pekan.

B. Saran

Perkembangan dinamisasi politik semakin hari semakin pesat. Ke depan partai-partai massa yang berkarakter paternalistik dan figuritas

sepertinya harus segera hengkang dari percaturan politik dalam negeri. Peralnya adalah kondisi masyarakat yang kian hari kian cerdas dalam menggunakan hak-hak politiknya. Faktor figuritas tidak akan mampu lagi menjadi senjata utama bagi partai untuk menggalang dan mengikat massa. Masyarakat ke depan akan lebih memiliki rasionalitas yang tinggi dalam mengkualifikasikan pemimpin bangsa.

Dalam hal ini, diperlukan adanya penjagaan eksistensi kepartaian. Selain melalui pendidikan politik, rekrutmen, diperlukan juga adanya pola komunikasi yang sehat dan seimbang di internal maupun eksternal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berangkat dari hal tersebut, pada bagian ini penulis ingin mencoba mengemukakan beberapa saran kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkaitan dengan pengembangan pola komunikasi internal anggotanya :

1. Pola komunikasi yang selama ini berkembang di internal keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diharapkan bisa terus dijaga dan dibudayakan sesuai dinamisasi yang berkembang di internal kepartaian. Tidak terlalu terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat pusat, wilayah, ataupun daerah.
2. Pola komunikasi struktural dan kultural seharusnya bisa menjadi aset komunikasi internal yang harus dijaga keberlangsungannya, dan bisa dikembangkan pula untuk menjalankan komunikasi eksternal.
3. Gesekan-gesekan yang terjadi di internal kader yang diakibatkan oleh faktor teknis pelaksanaan, seharusnya bisa diminimalisir, karena Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwah berbasis massa yang memiliki jargon profesional. Seharusnya tidak hanya jargon, tetapi bisa diterapkan seoptimal mungkin.

4. Mempertahankan budaya *tabayyun* (klarifikasi), karena inilah ciri khas dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang harus terus dibudayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Prof. Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Damanik, Ali Said., *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Teraju, Jakarta, 2003.
- Dewan Syariat Pusat PKS, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera*, Harakatuna Publishing, Bandung, 2006.
- Edward, Djony., *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*, Harakatuna Publishing, Bandung, 2006.
- Fisher, B.Aubrey, *Teori-teori Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Moleong, DR. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989.
- Muhammad, Dr. Arni., *Komunikasi Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Mulyana, Deddy., *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986.
- Mulyana, Deddy., *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintasbudaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto., *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Putra, Fadillah., *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Rakhmat, Jalaluddin., *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

Sutopo, H.B, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002.

Soekanto, Soerjono., *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Tim BPA, *Di Bawah Naungan Cahaya Ilahi*, Nurulhuda Press, Solo, 2006.

Referensi Lain

Daftar Skripsi

Istiqomah, Asri. 2008. Perilaku Komunikasi Antarbudaya pada Mahasiswa Malaysia dan Mahasiswa Indonesia di Fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Surakarta Sebuah Analisis Deskriptif Kualitatif

Subagja, Rahmat. 2003. Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta- Studi Analisis Deskriptif

Daftar Website

Partai Keadilan Sejahtera: <http://www.pks.or.id>

Pola Komunikasi: <http://id.wikipedia.org>

